

**POLA PENEMPATAN BANGUNAN PERKANTORAN
MASA KOLONIAL BELANDA DI KABUPATEN MAROS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin
Oleh

ANDI NURUL AFIZHA JANUARTI

Nomor Pokok : F61115009

DEPARTEMEN ARKEOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

LEMBAR PENGESAHAN

Sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor: **93/UN4.9.1/KEP/2019 tanggal 19 Februari 2019**, dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, 09 Januari 2020

Pembimbing I

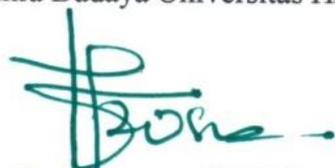
Pembimbing II


Dr. Anwar Thosibo, M.Hum.
Nip. 195711261986011001


Yusriana, S.S.,M.A.
Nip. 198407042014042001


Disetujui untuk diteruskan
Kepada Penitia Ujian Skripsi.
Dekan,

u.b. Ketua Departemen Arkeologi
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin


Dr. Resmawati, M.Si.
Nip. 197205022005012002

SKRIPSI

**POLA PENEMPATAN BANGUNAN PERKANTORAN MASA
KOLONIAL BELANDA DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NURUL AFIZHA JANUARTI

Nomor Pokok : F611 15 009

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada tanggal 23 Januari 2020

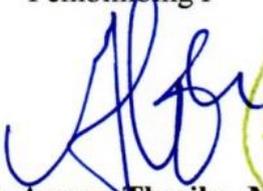
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Pembimbing,**



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Anwar Thosibo, M. Hum.
Nip. 195711261986011001


Yusriana, S.S.,M.A.
Nip. 198407042014042001

Dekan,
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Ketua Departemen Arkeologi,
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
Nip: 19640716 1991 03 1010


Dr. Rosmawati, M.Si.
Nip. 19720502 2005 01 2002

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Pada hari ini Kamis, 30 Januari 2020 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**POLA PENEMPATAN BANGUNAN PERKANTORAN MASA
KOLONIAL BELANDA DI KABUPATEN MAROS**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

30 Januari 2020



- | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|
| 1. Dr. Anwar Thosibo, M. Hum | Ketua | |
| 2. Yusriana, S.S., M.A | Sekretaris | |
| 3. Dr. Erni Erawati, M.Si. | Penguji I | |
| 4. Yadi Mulyadi S.S., M.A. | Penguji II | |
| 5. Dr. Anwar Thosibo, M. Hum. | Pembimbing I | |
| 6. Yusriana, S.S., M.A. | Pembimbing II | |

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak lupa pula saya panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun khazanah di muka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dari dosen dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
2. Prof. Dr. Akin Duli, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dr. Rosmawati, S.S., M.Si. selaku ketua Departemen Arkeologi.
4. Dr. Anwar Thosibo, M. Hum. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Yusriana, S.S., M.A. selaku Pembimbing II, terima kasih yang tak terhingga atas kesabaran dan kebaikannya dalam memberikan arahan dan bimbingan,

serta segala masukan untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga atas segala kebaikan dan motivasi yang diberikan agar penulis bisa menyelesaikan studi dengan cepat.

6. Dr. Anwar Thosibo, M. Hum. selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas kebaikan, bimbingan dan nasehatnya selama ini.
7. Seluruh staf pengajar Ibu dan Bapak Dosen Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala kebaikan dan waktu yang telah diluangkan untuk mengajar penulis selama menempuh studi. Terima kasih yang tak terhingga kepada, Drs. Iwan Sumantri, M.A, M.Si, Dr. Erni Erawati Lewa, M.Si, Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si, Dr. Muhammad Nur, M.A, Yadi Mulyadi., S.S, M.A, Dr. Muhlis, M. Hum, M. Bahar Akkase Teng, Lcp., M.Hum, Dr. Eng. Ilham Alimuddin, S.T., M.GIS, Ir. Djamaluddin, M.T, Dr. Hasanuddin, M.A, Asmunandar, S.S, M.A., serta Supriadi, S.S, M.A.
8. Ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga untuk kedua malaikatku, pahlawanku, semangat hidupku, dan kebahagiaan Surga dunia sampai akhiratku orang tua terbaik sepanjang masa. Untuk Ayahanda Andi Jamaluddin, terima kasih untuk setiap tetes keringat dan perjuangan yang dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan penulis hingga saat ini. Untuk Ibundaku Hariaty, terima kasih untuk setiap do'a dan kasih sayang tulus diberikan untuk penulis setiap harinya. Selanjutnya terima kasih untuk kakak dan adik penulis Andi Aliyah Amaliyah dan Andi Muh. Alifyansyah yang selalu memberikan support kepada penulis.
9. Seluruh kakak-kakak dan adik-adik Keluarga Mahasiswa Arkeologi Unhas

(KAISAR), terima kasih telah menjadi sahabat, teman, keluarga serta banyak memberikan ilmu dan bantuan selama ini.

10. Sahabat-sahabatku yang dipertemukan di lokasi KKN, terima kasih telah menambah keseruan di masa perkuliahan penulis. Tim Pacongang hits yaitu Kiki, Fitri, Yuyun, Elvi, Naya, Fajar, Gazali, dan Bapak Kordes Gais serta semua kawan-kawanku Paleteang Crew yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Semoga kita semua sukses.
11. Terima Kasih yang tak terhingga untuk **Lulu Project** yaitu Kak Erna, Kak Syarafat, Yustika, Yuyun, Lia, Hetika, Omang, dek Afdal dan Jaelani yang menjadi tim saya selama penelitian dalam pengambilan data di lapangan. I Love You So Much Guys.
12. Angkatan terbaik, Pillbox 2015, Terima kasih untuk rasa persaudaraan, kekeluargaan dan kepedulian yang selama ini diberikan untuk penulis. Terima Kasih atas segala bantuannya selama ini, dan terima kasih untuk keseruan, keceriaan dan warna yang kalian berikan kurang lebih hampir empat setengah tahun ini. Buat cewek-cewek cantik dan manis Nun, Mia, Chey, Wana, Ariny, Heradiani Olong, Chika, dan Sucji serta cowok-cowok terkeren sepanjang masa, Arwin, Camba (Sulfikar), Fifi (Zulfikar Eka Putra), Bibo, Anwar, Dipo, Andoni, Marwan, Tulus, Fery, Darfin, dan Syarwan. Kalian yang terbaik, maaf jika penulis selalu merepotkan kalian. Serta, sahabatku yang memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya di Arkeologi Unhas; Dian, Naryo, Jamal, dan Radit. Sukses untuk kita semua.
13. Terima Kasih yang tak terhingga untuk **My Beloved Soulmate Kakak**

Muh.Naning Fattah yang sangat banyak membantu, memotivasi, dan paling berjasa untuk penulis karena sudah meminjamkan laptop dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Para Sohib Fillahku Mega, Opu, Arafah, Emong, Ani, Pio, Fitri, Ilo, Pitti, Hasni, Fani, Hasdiq, yang juga selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

15. Terima Kasih juga seluruh kakak-kakak, adik-adik, dan kawan-kawan di organisasi **Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)** Kabupaten Maros yang juga banyak memotivasi penulis. Dan juga kawan-kawanku "**SECRET**" yang selalu menghibur penulis ketika berkeluh kesah karena persoalan penyusunan skripsi ini.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi hasil yang lebih baik sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat kedepannya.

Makassar, 28 Januari 2020

Andi Nurul Afizha Januarti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR KOMISI PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR FOTO.....	xi
DAFTAR GAMBAR DENAH	xiii
DAFTAR PETA	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Pengumpulan Data.....	7
1.4.2 Pengelolaan Data	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9

1.6 Landasan Teori	10
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1 Profil Wilayah Kabupaten Maros	17
2.2 Sejarah Singkat Kabupaten Maros.....	24
2.3 Masa Kolonialisme Di Kabupaten Maros.....	32
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
3.1 Kantor Kejaksaan Maros	35
3.2 Kantor <i>Landraad</i>	35
3.3 Kantor <i>Controleur</i> Belanda	38
3.4 Kantor Pemerintahan Belanda	42
3.5 <i>Post Cantoor</i>	45
3.6 Gudang Peralatan Kantor <i>Landraad</i>	48
3.7 Kantor Karaeng Turikale	52
BAB IV POLA PENEMPATAN BANGUNAN PERKANTORAN MASA KOLONIAL BELANDA DI KABUPATEN MAROS	
4.1 Interpretasi Pola Penempatan Bangunan	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR FOTO

Foto	Hal
1. Kantor Kejaksaan Tampak Depan.....	35
2. Kantor Kejaksaan Tampak Belakang	36
3. Kantor Kejaksaan Tampak Barat.....	36
4. Kantor <i>Landraad</i> Tampak Depan.....	38
5. Kantor <i>Landraad</i> Tampak Timur	39
6. Kantor <i>Landraad</i> Tampak Belakang	39
7. Kantor <i>Controleur</i> Belanda Tampak Depan.....	41
8. Kantor <i>Controleur</i> Belanda Tampak Timur	41
9. Papan Nama Museum Daerah Maros	42
10. Papan Pengumuman Cagar Budaya Museum Daerah	43
11. Kantor Pemerintahan Belanda Tampak Depan	45
12. Kantor Pemerintahan Belanda Tampak Atap	46
13. Papan Pengumuman Cagar Budaya Kantor Pemerintahan Belanda	46
14. <i>Poost Cantoor</i> Tampak Depan	48
15. <i>Poost Cantoor</i> Tampak Barat.....	49
16. <i>Poost Cantoor</i> Tampak Timur.....	49
17. <i>Poost Cantoor</i> Tampak Belakang	50
18. Gudang Peralatan Kantor <i>Landraad</i> Tampak Depan	52
19. Gudang Peralatan Kantor <i>Landraad</i> Tampak Barat	53
20. Pintu Depan Gudang Peralatan Kantor <i>Landraad</i>	53
21. Kantor Karaeng Turikale Tampak Depan	55

22. Kantor Karaeng Turikale Tampak Barat	56
23. Kantor Karaeng Turikale Tampak Belakang.....	56

DAFTAR GAMBAR DENAH

Gambar	Hal
1. Kantor Kejaksaan Maros	37
2. Kantor <i>Landraad</i>	40
3. Kantor <i>Controleur</i> Belanda	44
4. Kantor Pemerintahan Belanda.....	47
5. <i>Poost Cantoor</i>	51
6. Gudang Peralatan Kantor <i>Landraad</i>	54
7. Kantor Karaeng Turikale.....	57

DAFTAR PETA

Peta	Hal
1. Kabupaten Maros	18
2. Kecamatan Turikale	23
3. Sebaran Bangunan Dan Jalan Kolonial Kabupaten Maros	64
4. Keletakan Bangunan Perkantoran	69
5. Titik Situs Bangunan Perkantoran.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Luas Wilayah Kabupaten Maros Berdasarkan Desa/Kelurahan.....	19
2. Daftar Tinggalan Bangunan Perkantoran Masa Kolonial Belanda	34
3. Jarak Antar Bangunan	68

ABSTRAK

Andi Nurul Afizha Januarti, “Pola Penempatan Bangunan Perkantoran Masa Kolonial Belanda Di Kabupaten Maros”, **dibimbing Oleh Anwar Thosibo, dan Yusriana.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bangunan perkantoran yang didirikan pada masa Kolonial Belanda di Kabupaten Maros dan bentuk pola penempatan bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data pustaka dan data lapangan dengan menggunakan analisis dibuatkan peta khusus dengan memberikan warna sebagai tanda untuk penggambaran keruangan bangunan tersebut. Setelah itu dilakukan analisis spasial atau keruangan untuk melihat penempatan bangunan perkantoran, apakah berkelompok, menyebar rata, acak, linear, padat jarang dan sebagainya. Hasilnya akan dihubungkan dengan analisis keruangan bangunan tersebut, dan nantinya dalam kesimpulan pola penempatan bangunan perkantoran akan tergambar penempatannya pada pola ruang tertentu. Keberadaan bangunan kolonial Belanda di Kabupaten Maros tidak terlepas dari peranan bangsa Belanda saat menguasai Kabupaten Maros awal abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam kurun waktu tersebut, Belanda mendirikan berbagai jenis bangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya di masa itu, dimana bangunan tersebut terdiri atas bangunan perkantoran, bangunan pertahanan dan keamanan, bangunan keagamaan, bangunan pendidikan, dan bangunan rumah tinggal. Penelitian tentang *Pola Penempatan Bangunan Perkantoran Masa Kolonial Belanda Di Kabupaten Maros*, mengacu pada satu kategori bangunan dari beberapa jenis bangunan kolonial peninggalan Belanda di Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penempatan bangunan perkantoran masa kolonial Belanda, berbentuk pola linier yang memanjang di sepanjang jalan yang letaknya strategis di pusat kota atau pusat pemerintahan berdasarkan daerah kekuasaan Belanda agar dapat mengontrol dari daerah arah Makassar-Bone maupun dari arah Makassar-Pangkep.

Kata Kunci: *Pola Penempatan, Bangunan Perkantoran, Arkeologi Ruang, Maros*

ABSTRACT

Andi Nurul Afizha Januarti. "The Pattern of Placement of Colonial Office Buildings in Maros Regency" (supervised by Anwar Thosibo and Yusriana)

The aims of this research is to determine the office buildings that were established during the Colonial period in Maros Regency and the shape of the building placement pattern. The research method used is the collection of library data and field data using analysis in a special map by giving color as a sign for the depiction of the building spatial. After that, spatial analysis is performed to see the placement of office buildings, whether in groups, spread evenly, randomly, linearly, rarely and others. The results will be linked to the spatial analysis of the building, and later in the conclusion the placement pattern of office buildings will be drawn on a particular spatial pattern. The existence of colonial buildings in Maros Regency is inseparable from the role of the Colonialist when they controlled the Maros Regency in the early 18th century until the mid-20th century. During this period, the Colonialist erected various types of buildings to meet their various needs at that time, where the buildings consisted of office buildings, defense and security buildings, religious buildings, educational buildings, and residential buildings. Research on Placement Patterns of Colonial Office Buildings in Maros Regency, refers to one category of buildings from several types of colonial buildings from the Colonialist heritage in Maros Regency. The results showed that the pattern of placement of office buildings of the colonial period, in the form of a linear pattern that extends along a strategic road in the city center or government center based on the Colonialist territory in order to be able to control from the Makassar-Bone direction and from the Makassar-Pangkep direction.

Keywords: *Placement Pattern, Office Buildings, Archeology of Spaces, Maros*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Periode kolonialisasi Belanda di Kabupaten Maros mengikuti periode kolonialisasi di Kota Makassar yaitu setelah perjanjian Bongaya. Pada tahun 1723 merupakan awal kedatangan VOC di Kota Maros dan pada saat itu belum melakukan kegiatan apapun di daerah tersebut. Setelah VOC meninggalkan Makassar dan khususnya Kota Maros, kemudian kedudukan VOC digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada saat kedatangan Pemerintah Hindia Belanda inilah yang kemudian melakukan ekspansi wilayah pada tahun 1824 dan telah menguasai daerah Maros sampai akhir masa pemerintahannya pada tahun 1942 (Makkasau, 1990: 35)

Kedudukan daerah Maros sebagai *Tumailalang Towa*¹ dalam pemerintahan Kerajaan Gowa, memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga menjadi sumber surplus beras, sebagai pintu gerbang bagi Kerajaan Bone, dan menyebabkan kolonial Belanda melakukan ekspansi di wilayah ini (Barbara Sillars Harvey, 1989 dan Asis, 1991 dalam Haerani Jarnia, 2010:4). Selain itu, dengan potensi sungai yang ada di Maros, yaitu sungai Maros yang cukup luas, panjang, memiliki pengaruh dan peran yang sangat strategis sehingga kolonial Belanda berkeinginan untuk mendirikan sekolah angkatan laut atau pelayaran dengan nama “Maros” tepatnya di daerah yang diberi nama Labuang. Tetapi pada saat peristiwa

¹ *Tumailalang Towa* adalah orang kepercayaan pada suatu kerajaan yang memiliki jabatan penting atau perantara antara penguasa/raja dengan perdana menterinya.

Perang Dunia II terjadi dan kolonial Belanda dikalahkan oleh Jepang, maka keinginan Belanda tersebut tidak terlaksana (Haerani, 2010:4).

Sebelum kota Kolonial Belanda di Turikale, pusat Kabupaten Maros adalah Kassikebo, yang dicirikan oleh sebuah sistem tata kota Islam yang teosentrik, berkisar pada Tuhan yang diwujudkan oleh keletakan masjid di tengah permukiman. Pada masa kolonial Belanda, Maros berubah menjadi *guard city of*² Makassar, dan Kassikebo tidak relevan lagi. Pusat kota Maros kemudian dipindahkan ke Turikale. Pusat Kota Maros sekarang tetap di Turikale, merupakan kelanjutan dari Kota Kolonial Belanda (Nur dkk, 2014: 95).

Penelitian terhadap bangunan kolonial Belanda di Maros pada dasarnya sudah pernah dilakukan dengan berbagai isu dan permasalahan yang ingin dipecahkan. Diantaranya seperti Hasanuddin, dkk. 2012, dalam tulisan yang berjudul *Laporan Penelitian Pelestarian Sumberdaya Arkeologi Pada Bangunan Kolonial Di Kota Makassar dan Maros*, Balai Arkeologi Makassar yang membahas untuk membuat rumusan tingkat ancaman dan nilai penting dari setiap bangunan-bangunan kolonial yang di Kota Makassar dan Maros. Hasil penelitian ini sebagai rekomendasi kepada pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelestarian, untuk melihat prioritas bangunan-bangunan dari masa kolonial yang perlu dilindungi dan dilestarikan di Kota Makassar dan Maros.

Nur, Muhammad, dkk. 2014, dalam tulisannya yang berjudul *Kota Maros Masa Kolonial*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Maros dalam buku ini menjelaskan masa Kolonial Belanda dan pendudukan Jepang,

² *Guard of City* adalah kota penjaga atau penyangga bisa juga disebut sebagai batas kota

adapun data-data yang diajukan sejumlah bangunan perkantoran, bangunan pertahanan dan keamanan, rumah tinggal, sarana rekreasi, jaringan jalan, bendungan, sungai, dan jembatan. Dari hasil data diatas mendapatkan gambaran tentang bentuk tata kota Maros masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, aspek-aspek arsitektur bangunan kolonial kota Maros, dan perubahan kota Maros, dimulai dari tata kota Islam Kassikebo, tata kota Kolonial di Turikale, dan tata kota Maros masa pendudukan Jepang. Haerani, Jarnia. 2011 dalam penelitian skripsi yang berjudul *Persebaran Bangunan Kolonial Belanda di Kota Maros* yang membahas tentang bentuk penataan dan keberadaan bangunan-bangunan kolonial Belanda yang ada di Kota Maros.

Pemilihan bangunan perkantoran dibandingkan dengan bangunan lainnya seperti sarana pendidikan, bangunan keagamaan, rumah tinggal, bangunan pertahanan dan keamanan, dan yang lainnya merupakan ketertarikan penulis secara subjektif untuk melakukan analisis khusus terhadap bangunan perkantoran saja. Hal ini tentunya untuk membatasi kajian yang sifatnya meluas. Di samping itu sumber data, baik itu data pustaka maupun berupa data bangunan perkantoran masih tersisa hingga saat ini cukup memadai untuk dilakukan kajian terhadap kategori bangunan ini.

Sebagaimana kita ketahui Kabupaten Maros yang kita kenal selama ini memiliki banyak tinggalan budaya arkeologi, seperti zaman Prasejarah, Islam, maupun Kolonial. Di Kabupaten Maros memiliki beberapa tinggalan kolonial

seperti *Beheaderd Huis van Berawing*³ Maros (bangunan penjara), *Pesangrahan Pradjoerits-Kazerne*⁴ (Polres Maros), Balla Lompoa Maros, Kantor Pekerjaan Umum, Kantor Pos, Kantor Pekerjaan Umum, Kantor Camat Turikale (Museum Daerah Maros), dan sebagainya. Setiap bangunan-bangunan tersebut memiliki fungsi masing-masing pada masanya dan sampai saat ini sudah ada yang beralih fungsi.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa sangat perlu untuk melakukan suatu penelitian dengan mengkaji Pola Penempatan Bangunan Kantor Pemerintahan Kolonial Belanda di Kabupaten Maros. Karena sebagaimana kita ketahui Pola Penempatan Bangunan Perkantoran Masa Kolonial Belanda di Kabupaten Maros belum dikaji secara intensif. Hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk menelusurinya dengan mengadakan penelitian dan menulisnya dalam sebuah skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Maros adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang pernah dikuasai oleh pemerintah Kolonial Belanda karena merupakan daerah yang cukup luas, dan daerah peralihan atau persinggahan untuk jalur darat rute Makassar ke Bone kemudian Makassar ke Pangkep. Dengan tata letak daerah yang strategis, menjadikan pemerintah Kolonial Belanda mengembangkan Kabupaten Maros dan bermukim dengan membangun beberapa sarana sebagai penunjang kelangsungan hidup mereka.

³ *Beheaderd Huis van Berawing* adalah rumah tahanan zaman Kolonial Belanda di Kabupaten Maros

⁴ *Pesangrahan Pradjoerits-Kazerne* adalah markas atau tangsi polisi

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang berada di Sulawesi Selatan dan memiliki tinggalan-tinggalan kolonial Belanda diantaranya berupa bangunan. Penelitian tentang bangunan kolonial di Maros sudah pernah dilakukan, baik itu dari instansi kepurbakalaan, kalangan akademisi, maupun mahasiswa.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum ada yang membahas mengenai pola penempatan bangunan perkantoran kolonial Belanda khususnya di Kabupaten Maros. Dengan demikian, penulis ingin melakukan kajian penelitian yang dimana membahas mengenai pola penempatan bangunan perkantoran kolonial Belanda dan dikhususkan pada bangunan perkantoran masa Kolonial Belanda di Kabupaten Maros.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran mengenai titik-titik tinggalan bangunan perkantoran masa kolonial Belanda di Kabupaten Maros sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk lebih memahami perkembangan kantor pemerintahan Kabupaten Maros pada masa kolonial Belanda. Khusus bangunan perkantoran yang menjadi objek kajian, menurut penulis kajian ini representatif dilakukan agar dapat memberikan keterangan mengenai hubungan-hubungan serta asumsi-asumsi dari faktor penempatan bangunan tersebut, baik dilihat dari pertimbangan politik maupun pertimbangan adaptif yang mengkhhususkan pola penempatannya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, pada umumnya konsentrasi bangunannya berlokasi di kecamatan Turikale, tepatnya di Ibu kota Kabupaten Maros. Bersumber dari data awal, dan pemaparan permasalahan di

atas, penulis mencoba merumuskan beberapa pertanyaan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Bangunan perkantoran apa saja yang didirikan pada masa Kolonial Belanda di Kabupaten Maros?
- 2) Bagaimana pola penempatan bangunan perkantoran pemerintahan masa kolonial Belanda di Kabupaten Maros?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kajian arkeologi, dimana studi arkeologi memiliki tiga tujuan pokok yaitu: merekonstruksi sejarah budaya, merekonstruksi cara-cara hidup, dan menggambarkan proses budaya. Dalam penulisan ini penulis menitikberatkan pada tujuan arkeologi pertama yaitu merekonstruksi sejarah budaya dan penggambaran proses budaya, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bangunan perkantoran yang didirikan pada masa Kolonial Belanda di Kabupaten Maros.
- 2) Untuk mengetahui pola penempatan bangunan perkantoran masa Kolonial Belanda di Kabupaten Maros.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan langkah awal bagi penelitian bangunan-bangunan perkantoran peninggalan kolonial Belanda di Kabupaten Maros, karena situs kolonial Belanda di Maros masih kurang memberikan informasi bagi khalayak masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberi manfaat:

- 1) Dapat memberikan pengetahuan mengenai masa kolonial Belanda di Kabupaten Maros.
- 2) Memberikan informasi bahwa bangunan-bangunan kolonial Belanda di Kabupaten Maros yang merupakan salah satu tinggalan arkeologi kolonial sepatutnya dikenal oleh masyarakat, dilindungi dan dilestarikan.
- 3) Bisa menumbuhkan rasa minat mahasiswa Universitas Hasanuddin khususnya mahasiswa arkeologi terhadap penelitian tinggalan arkeologi kolonial Belanda di Kabupaten Maros.

1.4 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian karya ilmiah tentu dibutuhkan beberapa metode untuk mencapai suatu tujuan penelitian, seperti halnya dalam penelitian arkeologi. Berikut tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam kajian ini :

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan cara berupa mencari literatur seperti skripsi, jurnal, internet, serta buku-buku atau tulisan-tulisan yang membahas mengenai bangunan-bangunan kolonial di Kabupaten Maros, dan juga buku Sejarah Kebudayaan Indonesia khususnya perkembangan arsitektur di Nusantara.

2. Pengumpulan Data Lapangan

Adapun data lapangan yang dilakukan dalam suatu penelitian seperti:

- a) Observasi, pada tahap ini penulis melakukan pengamatan langsung pada situs bangunan kantor pemerintahan zaman kolonial Belanda di Kabupaten Maros.

Pengumpulan data ini salah satu usaha pengumpulan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, kemudian melakukan pendeskripsian.

- b) Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi lisan yang berupa cerita-cerita lama yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Hasil wawancara dirangkum dan dijadikan sebagai bahan pelengkap data dalam penyusunan skripsi ini. Wawancara dilakukan terhadap tiga kategori informan, yaitu :
 - a. Pejabat yang bersangkutan langsung dengan objek penelitian
 - b. Ilmuan, budayawan, sejarawan;
 - c. Masyarakat umum yang tinggal di sekitar situs maupun yang mengetahui latar belakang situs.
- c) Survei lapangan dilakukan dengan cara pengamatan dan penyelidikan terhadap bangunan Kantor Pemerintahan kolonial Belanda di Kabupaten Maros. Selanjutnya untuk tahap perekaman data penulis secara teknis terlebih dahulu mengajukan surat rekomendasi penelitian kepada instansi yang terkait yaitu: Balai Pelestarian Cagar Budaya (Sulselbar), yang kemudian menjadi rujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk keperluan penelitian, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam pengambilan dibantu oleh beberapa mahasiswa arkeologi dengan menggunakan peralatan berupa kompas, skala, roll meter, alat tulis menulis dan lainnya.

d) Dokumentasi adalah tahap untuk mengabadikan objek pada letak sebenarnya dengan pemotretan, pemetaan, penggambaran dan pengukuran.

1.4.2 Metode Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh dari data pustaka dan data hasil penelitian di lapangan. Hasil analisis ini kemudian dibuatkan peta khusus dengan memberikan warna sebagai tanda untuk penggambaran keruangan bangunan tersebut. Setelah itu dilakukan analisis spasial atau keruangan untuk melihat penempatan bangunan perkantoran, apakah berkelompok, menyebar rata, acak, linear, padat jarang dan sebagainya. Hasilnya akan dihubungkan dengan analisis keruangan bangunan tersebut, dan nantinya dalam kesimpulan pola penempatan bangunan perkantoran akan tergambar penempatannya pada pola ruang tertentu.

1.5 Tinjauan Pustaka

Bangunan peninggalan Belanda adalah objek yang penting untuk diteliti. Penelitian terhadap bangunan-bangunan peninggalan Belanda di Kabupaten Maros telah dilakukan oleh beberapa instansi terkait maupun individual. Seperti penelitian secara individual yang dilakukan oleh mahasiswa arkeologi Unhas dalam bentuk skripsi oleh Rohani pada tahun 1992. Skripsi yang berjudul Konstruksi Bunker Jepang di kecamatan Mandai Kabupaten Maros ditulis oleh Rosliana Muthalib pada tahun 1999. Skripsi yang berjudul Kedudukan daerah Maros di bawah masa pendudukan Jepang 1942-1945 ditulis oleh Abdul Asis DM pada tahun 1991. Skripsi serupa yang ditulis oleh penulis yang membahas tentang arkeologi ruang juga pernah dibahas oleh Baharuddin pada tahun 2013 yang

berjudul Pola Penempatan Bangunan Kantor Pemerintahan Kolonial Belanda di Kota Makassar.

Tinggalan-tinggalan zaman kolonial yang ada di Kabupaten Maros terbagi atas dua, yaitu tinggalan zaman kolonial Belanda dan tinggalan zaman pendudukan Jepang. Pada penulisan ini, penulis hanya akan mengkaji dengan melakukan penelitian terhadap tinggalan bangunan kantor pemerintahan pada zaman Hindia Belanda. Secara administratif Kecamatan Turikale merupakan Ibukota dari Kabupaten Maros dan salah satu bukti sejarah yang bisa mengungkapkan, menggambarkan kehidupan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

1.6 Landasan Teori

Kebudayaan Indis merupakan perpaduan antara kebudayaan Belanda dan kebudayaan lokal Indonesia. Kehadiran kebudayaan Indis meliputi rentang waktu waktu sejak kehadiran bangsa Belanda sampai pertengahan abad ke-20, yaitu kalahnya Belanda oleh Jepang. Hasil kebudayaan Indis yang berhubungan dengan seni karya budaya fisik, meliputi seni bangunan, seni rupa, dan seni kerajinan. Seni bangunan Indis pada awalnya berupa bangunan rumah pejabat kolonial, pemerintahan, militer, dan juga tempat ibadah (Soekiman 1997, 2011 dalam Marzuki, Irfanuddin Wahid 2015: 93-94).

1.6.1 Arkeologi Ruang

Arkeologi ruang merupakan salah satu studi dalam bidang arkeologi yang kajiannya pada dimensi ruang (spasial) dari benda atau situs arkeologi dari pada pengkajian atas dimensi bentuk (formal) dan dimensi waktu (temporal). (L. Clarke

1977 dalam Baharuddin 2013: 28). Pola keletakan tinggalan arkeologi ruang mengacu pada kajian keruangan (*spatial archaeology*), yang mencari sebaran dan hubungan artefak dalam skala mikro, semi mikro/meso, dan makro. Penelitian mengenai pola hubungan sebaran situs, hubungan antar situs dan faktor yang mempengaruhinya merupakan penelitian dalam skala makro. Kajian arkeologi ruang merupakan kajian penelitian dengan pendekatan dimensi ruang yang dimiliki benda arkeologi sebagai data utamanya.

Data utama yang diperlukan dalam arkeologi ruang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Keletakan (elemen/unsur) yang mencakup antara lain artefak, *raw materials*, dan sisa bahan pembuatan, infrastruktur fisik yang mengakomodasi elemen/unsur berupa fitur, struktur, jalan, dan ruang sumber (*resource space*).
- b. Satuan ruang sebagai tempat komunitas manusia beraktivitas (skala makro, mikro dan meso/semi mikro), lingkungan sumberdaya yang berada di dekat mereka atau mereka terkait dengan mereka.
- c. Hubungan-hubungan atau interaksi di antara semua unsur-unsur tersebut dalam satuan-satuan ruang yang berbeda skalanya (Marzuki, Irfanuddin 2015: 94).

Studi arkeologi ruang dengan demikian tidak memberikan titik berat perhatian kepada benda arkeologi sebagai satu entitas (*entity*), melainkan kepada sebaran (*distribution*) dari benda-benda dan situs-situs arkeologi, kemudian hubungan (*relationship*) antara benda dengan benda dan antara situs dengan situs, serta hubungan antara benda atau situs dengan lingkungan fisiknya sebagai sumberdaya.

Arkeologi ruang tidak hanya mengkaji hubungan lokasional atau keruangan antara artefak (*artifact*), tetapi juga dengan dan antara bentuk-bentuk data arkeologi lain yang kesemuanya itu (Clarke, 1977 dalam Mundarjito, 2002:3).

Kajian arkeologi perkotaan dapat diartikan sebagai studi arkeologi tentang budaya kota karena pada dasarnya kota merupakan hasil adaptasi sekelompok manusia dalam jumlah yang cukup besar terhadap lingkungan budaya dan alamnya. Secara fisik, kota merupakan daerah perumahan dan bangunan-bangunan yang merupakan kesatuan tempat kediaman, selain itu kota juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Berdasarkan perkembangan dan perencanaannya, kota dapat dibagi menjadi dua yaitu kota yang direncanakan dan kota organik. Penulis lebih memfokuskan ke kota yang direncanakan yaitu sebuah kota yang direncanakan dilihat dari adanya jaringan jalan utama yang berpola dan pada jaringan tersebut terdapat bangunan-bangunan hunian. Objek pengamatan unit observasi artefak dalam studi perkotaan berupa komponen-komponen kota yang terdiri dari bangunan dan sarana transportasi.

Berdasarkan pemanfaatannya, bangunan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis seperti bangunan dan sarana transportasi. Berdasarkan pemanfaatannya, bangunan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis seperti bangunan perumahan, perniagaan, pergudangan, pertahanan dan fasilitas umum terdiri dari perkantoran dan pasar, sedangkan fasilitas umum terdiri dari sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, taman umum, dan sebagainya. Sarana transportasi

dapat berupa jaringan jalan, kanal, dan sungai yang merupakan media transportasi di dalam kota dan penghubung kota dengan wilayah-wilayah di sekitarnya.

1.6.2 Definisi Perkantoran

Kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu *Kantoor* yang artinya ruangan tempat bekerja, tempat instansi dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata *Office* yang artinya tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja atau posisi. Pengertian tentang kantor dibagi ke dalam dua bagian yang diantaranya arti secara dinamis dan secara statis.

Arti kantor secara dinamis yaitu proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian data. Jadi dalam arti sempit merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi atau tata usaha. Sedangkan arti kantor secara statis yaitu tempat kerja, kamar kerja, ruang kerja, biro, marka, instansi, badan, perusahaan maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan serta pendistribusian data.

Pengertian Kantor menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Moekijat, kantor adalah setiap tempat yang biayanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha, dengan nama apapun juga tempat tersebut mungkin diberikan.
- b. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kantor adalah unit organisasi terdiri atas tempat, staff personel, dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan.
- c. Menurut KBBI, kantor adalah balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan atau juga disebut tempat kerja.

Tujuan kantor adalah memberikan pelayanan komunikasi dan perekaman.

Sedangkan fungsi dari kantor adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Informasi, fungsi kantor yang menerima segala macam bentuk informasi, seperti surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan juga semua laporan tentang segala macam kegiatan bisnis. Selain menerima informasi yang masuk, kantor juga memiliki fungsi untuk memperoleh informasi secara lebih lanjut yang nantinya mungkin akan diminta oleh manajemen.
- b. Merekam informasi, fungsi kantor yang merekam/menyimpan informasi agar informasi tersebut dapat sesegara mungkin disiapkan apabila pihak manajemen memintanya. Rekaman atau *record* semua informasi harus disimpan untuk kepentingan hukum atau sebagai sebuah alat bukti.
- c. Mengatur Informasi, kantor berfungsi untuk mengatur segala macam bentuk dari sebuah informasi dengan cara yang sistematis agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan/digunakan oleh pihak yang membutuhkan secara maksimal.
- d. Memberikan informasi, kantor berfungsi untuk memberikan berfungsi kepada pihak yang membutuhkan. Apabila pihak manajemen meminta informasi, kantor memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan data yang telah diterima, dihimpun, diatur dan disimpan. Sebagai informasi yang disajikan dapat bersifat rutin dan sebagian yang lain dapat bersifat khusus atau insidental. Informasi juga dapat diberikan secara lisan atau tertulis.
- e. Melindungi aset/harta, kantor memiliki fungsi untuk melindungi aset atau harta. Segala macam bentuk informasi atau data yang diterima oleh kantor adalah

sebuah aset atau harta dari kantor tersebut. Kantor tidak akan berfungsi sepenuhnya jika dibatasi pada fungsi menerima, merekam, mengatur dan memberi informasi saja. Kantor juga harus dapat melindungi aset atau harta (informasi atau data), baik tempat penyimpanannya maupun isi dari informasi atau data tersebut sehingga benar-benar digunakan untuk kepentingan perkantoran dan informasi tidak jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pengertian yang diuraikan dalam penulisan ini, maka sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: merupakan **Pendahuluan** yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, landasan teori, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: berisi **Profil Wilayah** Penelitian berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, keadaan geografis, geomorfologis, sejarah singkat Kabupaten Maros, sejarah singkat situs dan keadaan situs.

BAB III: berisi **Deskripsi** berisikan deskripsi mengenai situs, Bangunan-bangunan Perkantoran zaman Kolonial Belanda yang ada di Kabupaten Maros.

BAB IV: merupakan **Pembahasan** dari rangkaian penulisan memuat uraian analisis *Pola Penempatan Bangunan Perkantoran zaman Kolonial Belanda di Kabupaten Maros* yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: merupakan **Penutup** dari penulisan ini yang berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dan saran yang kemungkinan menjadi acuan terhadap penelitian kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Profil Wilayah Kabupaten Maros

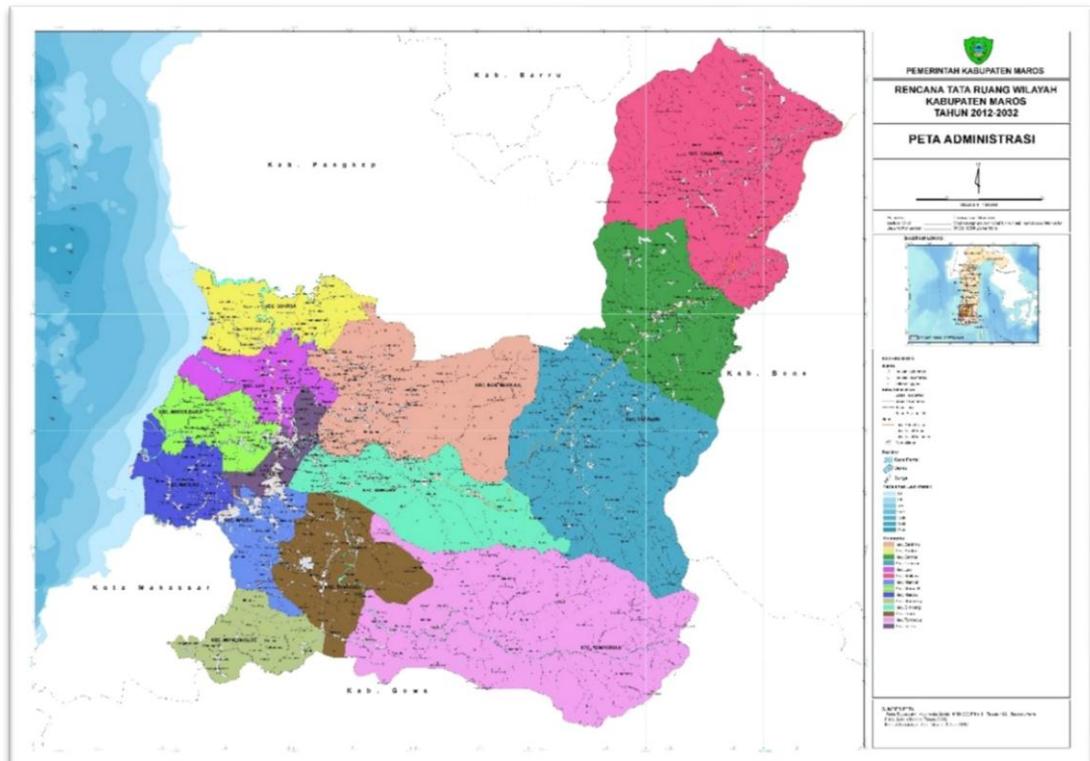
2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Maros merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian barat Sulawesi Selatan. Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.525,54 km². Secara astronomis Kabupaten Maros terletak pada 40° 45' 50" 07' LS dan 109° 205'-129° 12' BT.

Secara geografis Kabupaten Maros berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep,
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa,
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone,
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Ibukota Kabupaten Maros terletak 30 km arah utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Maros yang berdekatan dengan Kota Makassar merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Maros (Sumber Dinas Pekerjaan Umum Maros)

Berdasarkan pencatatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 27,3°C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 22,5°C sedangkan paling tinggi adalah 34,8°C. Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 297 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 170 hari selama tahun 2014, dengan rata-rata suhu udara minimum 24,1°C dan rata-rata suhu udara maksimum 31,8°C. Secara administratif, Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan, 105 Desa dan 23 Kelurahan.

Adapun luas wilayah berdasarkan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Maros Dirinci Berdasarkan Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (Km ²)
1.	Mandai	6	49,11
2.	Moncongloe	6	46,87
3.	Turikale	7	29,93
4.	Tompobulu	8	287,66
5.	Marusu	7	53,73
6.	Simbang	6	105,31
7.	Tanralili	8	89,45
8.	Camba	8	145,36
9.	Cenrana	7	180,97
10.	Mallawa	12	235,92
11.	Bontoa	9	93,52
12.	Maros Baru	7	53,76
13.	Lau	6	73,83
14.	Bantimurung	8	173,70
	Jumlah	105	

Sumber: <https://maroskab.bps.go.id/publication/2018/08/16/kabupatenmaros-dalam-angka-2018.html>

2.1.2 Kependudukan

Penduduk kabupaten Maros berjumlah 318.238 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 155.761 jiwa dan perempuan sebanyak 162.477 jiwa. Mayoritas warganya berasal dari suku/etnis bugis makassar dan mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam.

2.1.3 Geomorfologis

Kabupaten Maros terbagi dalam empat satuan geomorfologi, sebagai berikut:

- a) Satuan pegunungan vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 mdpl) menempati luas 30% dari luas daerah Kabupaten Maros. Relief topografi, tinggi kemiringan, lereng terjal, tekstur topografi kasar. Batuan penyusunnya yaitu batuan gunung api.
- b) Satuan perbukitan vulkanik: Intrusi dan sedimen. Menempati daerah perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas Kabupaten Maros. Batuan penyusunnya, batuan vulkanik, Beku (intrusi) dan sedimen.
- c) Satuan perbukitan Karst: Satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada bagian tengah, timur laut daerah Kabupaten Maros, luas sekitaran 30%. Relief topografi karst membentuk tower-tower dengan relief yang kasar. Batuan penyusunnya, batu gamping (batu kapur).
- d) Satuan Pedataran Alluvium: Terletak dibagian barat yang tersebar dengan arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas daerah Kabupaten Maros.

Topografi datar, relief rendah, tekstur topografi halus. Batuan penyusunnya, batuan endapan aluvial.

Jenis tanah berdasarkan hasil identifikasi yang pernah dilakukan di Kabupaten Maros terdapat lima jenis tanah yang tersebar di beberapa daerah seperti jenis tanah aluvial, litosol, mediteran dan podsolik. Jenis tanah aluvial biasanya berwarna kelabu, coklat atau hitam. Jenis tanah ini tidak peka terhadap erosi karena terbentuk dari endapan laut, sungai atau danau dan jenis tanah ini terdapat disepanjang pantai sebelah barat Kabupaten Maros, luas penyebarannya 56.053 ha atau 34%.

Jenis tanah litosol terbentuk dari batu endapan, batuan beku, jenis tanah ini mempunyai sifat beraneka ragam dan sangat peka terhadap erosi serta kurang baik untuk tanah pertanian, luas penyebarannya 51.498 ha atau 31%. Jenis tanah mediteranterbentuk dari batu endapan berkapur, batua baku basis, intermedion dan metamorf, jenis tanah ini berwarna merah sampai coklat dan kurang peka terhadap erosi, luas persebarannya 45.632 ha atau 28%.

Jenis podsolik terbentuk dari batuan endapan dan bekuan berwarna kuning sampai merah mempunyai sifat asam dan peka terhadap erosi. Jenis tanah ini dapat dijadikan tanah pertanian, perkebunan. Jenis tanah ini terdapat di daerah berbukit sampai bergunung, luas persebarannya 8.729 ha atau 5% dan jenis tanah latosol mempunyai luas persebaran 17.862 ha atau 11%.

Ketinggian suatu tempat dari permukaan laut terutama di daerah tropis dapat menentukan banyaknya curah hujan dan suhu. Ketinggian juga berhubungan erat dengan konfigurasi lapangan, unsur-unsur curah hujan, suhu dan konfigurasi

lapangan mempengaruhi peluang pembudidayaan komoditas. Ketinggian wilayah di Kabupaten Maros berkisar antara 0-2000 meter dari permukaan laut. Di bagian Barat wilayah Kabupaten Maros dengan ketinggian 0-25 meter dan di bagian Timur dengan ketinggian 100-1000 meter lebih. Pada Kabupaten Maros dengan ketinggian 0-25 m merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah 63.083 ha atau sebesar 39% sedangkan daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada ketinggian >1000 m dengan luas wilayah 7.193 ha atau sebesar 4% dari luas total wilayah perencanaan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 3-2.

2.1.4 Gambaran Umum Kecamatan Turikale

Kecamatan Turikale adalah bukan daerah pantai dan sebagian besar berbentuk dataran. Dari tujuh daerah wilayah administrasi yang ada, mempunyai topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-20 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah kecamatan Turikale 29,93 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Lau
- b) Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Bantimurung dan Simbang
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Mandai
- d) Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Maros Baru

b. Pertanian

Masyarakat di Kecamatan Turikale tidak lagi didominasi oleh sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus pertanian 2013 dimana hanya 1.138 (12,67%) rumah tangga yang mengelola usaha tanaman pangan dengan total keseluruhan luas Kecamatan Turikale. Demikian pula dengan usaha pertanian di subsektor lainnya seperti hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan.

2.2 Sejarah Singkat Kabupaten Maros

Maros, sebuah negeri yang terbentang cukup luas mulai dari sebelah Selatan Kota Makassar dan melebar ke Barat sampai tepi Selat Makassar. Sekitar awal abad XV di Maros berdiri sebuah Kerajaan yang cukup besar dan berpengaruh dikenal dengan nama Kerajaan Marusu. Kerajaan Marusu cukup berpengaruh karena di samping letaknya yang strategis, yaitu diantara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, juga karena prinsipnya dalam menjalankan tata kehidupan politik dan kenegaraan yang tidak punya ambisi melebarkan sayap kekuasaan. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Marusu memiliki keadaan hidup yang sederhana dan tidak hidup dengan bermewah-mewah yang bersumber dari hasil tebusan pengorbanan-pengorbanan rakyatnya. Kerajaan Marusu juga mempunyai sifat *tepa selira*, toleransi dan sikap uluran tangan persahabatan yang cukup besar.

Hal tersebutlah yang menyebabkan Kerajaan Marusu senantiasa menjadi rebutan perhatian Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, dua kerajaan besar yang saat itu memegang hegemoni politik di Sulawesi Selatan. Bukan untuk dijadikan negara jajahan tetapi untuk dijadikan sekutu dalam menjalankan tata kehidupan

politik. Kerajaan Marusu dihuni oleh suku Bugis dan Makassar, tetapi pada hakekatnya Kerajaan Marusu didominasi oleh suku Bugis Makassar, sebab disamping karena bahasa yang dipergunakan juga karena Kerajaan Marusu memang diidentifikasi sebagai salah satu negeri "*To Mangkasara*" sebagaimana halnya dengan Gowa, Takalar, Galesong, Bantaeng, Topejawa, Laikang, Binamu, dan Bangkala.

Dalam Lontara Patturioloanga Ri Gowa tercatat adanya sebuah Kerajaan yang bernama Kerajaan Marusu. Kapan berdirinya tidak diketahui secara tepat, tetapi dapat diperkirakan Kerajaan Marusu berdiri dengan Raja Pertama Karaeng Loe Ri Pakere ketika di Kerajaan Gowa mulai surut pemerintahan I Pakere Tau Tunijallo Ri Passukki Raja Gowa VIII jadi sekitar tahun 1463. Setelah Belanda berhasil mematahkan perlawanan sebagian besar kekuatan pertahanan dan perlawanan Raja-raja di Sulawesi Selatan termasuk kerajaan Marusu, maka situasi Kerajaan Marusu pun mengalami perubahan, termasuk corak dan bentuk pemerintahannya. Bukan lagi sebuah kerajaan murni, tetapi hanya sebuah kerajaan kecil berbentuk adat *Regentschap/Gemenschap*⁵ dengan kepala pemerintahan bergelar *Karaeng* yang merupakan Raja Tak Bermahkota (*onttronde forsten*) tidak seperti sebelumnya, dan Marusu sendiri terpecah menjadi beberapa Kerajaan kecil sehingga Marusu tinggal tersisa 36 kampung. Perubahan ini ditandai oleh penyerahan tahta dari Kare Yunusu sebagai raja Marusu terakhir Kerajaan Marusu Besar kepada La Mamma Daeng Marewa.

⁵ *Regentschap/Gemenschap* adalah kabupaten (dalam bahasa Belanda)

Kerajaan-kerajaan yang baru berdiri di wilayah Kerajaan Marusu ialah Simbang, Bontoa, Tanralili, Raya, Lau' dan Turikale yang semuanya berdiri pada Abad XVIII. Namun selanjutnya untuk menggalang persatuan kembali keutuhan wilayah di Marusu, La Mamma Daeng Marewa Karaeng Marusu mengajak Raja-Raja dari Kerajaan tersebut membentuk sebuah Forum Komunikasi Lembaga Adat yang kemudian dikenal dengan sebutan *Toddo Limaya Ri Marusu*⁶. Awalnya yang menjadi anggotanya ialah Marusu, Bontoa, Tanralili, Simbang dan Raya (Lima Kerajaan) tetapi selanjutnya Simbang dilebur menjadi satu dengan Turikale dan Raya dilebur ke dalam Lau', sehingga Turikale dan Lau' masuk menggantikan Simbang dan Raya. Pada awal Abad XX, Simbang kembali melepaskan diri, sehingga kembali menjadi bagian dari *Toddo Limaya Ri Marusu* menggantikan Tanralili yang di kelompokkan bersama dengan daerah-daerah Gallarang Appaka oleh Pemerintah Belanda.

Pada awalnya sekitar permulaan Abad XVI yaitu ketika duduk bertahta Raja Gowa IX yang bernama I Daeng Matanre Karaeng Mangnguntungi Tumapa'Risi Kallongna yang memerintah 1510-1546, Kerajaan Marusu diserang dan dijadikan sebagai sebuah Negara Sekutu, bahkan selanjutnya Kerajaan Marusu berperan membantu Gowa menaklukkan Panaikang, Mandalle dan Cempaga. Kemudian Raja Marusu I bergelar Karaeng Loe Ri Pakere membuat perjanjian persahabatan dengan I Daeng Matenre Karaeng Mangnguntungi Tumapa' Risi Kallongna Raja Gowa IX dengan La Olio Botee Matinroe Ri Itterung Raja Bone VI serta dengan Raja Polong Bangkeng bergelar Karaeng Loe Ri Bajeng.

⁶ *Toddo Limaya Ri Marusu* adalah persatuan adat lima kerajaan di Maros

Namun ketika Kerajaan Gowa berperan melawan Kerajaan Tallo yang ketika itu diperintah oleh I Mangngayoang Berang Karaeng Pasi, Kerajaan Marusu justru membantu Tallo. Yang menjadi Raja Marusu ketika itu I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Patanna Langkana Raja Marusu IV. Mengapa Kerajaan Marusu justru membantu Tallo, padahal sebelumnya antara Marusu dan Gowa terikat oleh sebuah perjanjian persahabatan, bahkan akibat dari perjanjian itu Raja Marusu menjadi *Tumailalang* di Kerajaan Gowa? Hal tersebut terjadi karena hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Patanna Langkana Raja Marusu IV bersaudara kandung dengan Permaisuri Raja Tallo bernama I Pasilembang Tumamalianga Ri Tallo, keduanya adalah anak dari Karaeng Loe Ri Marusu Raja Marusu III.

Dalam pertempuran tersebut Raja Gowa IX Tumpa' Risi Kallongna mengerahkan laskarnya di bawah tiga panji Kebesaran Kerajaan Gowa. Masing-masing laskar tersebut adalah laskar di bawah pimpinan Karaeng Lakiung dengan Panji Garudaya yang beranggotakan Mangasa, Tombolo, Lakiung dan Saumata. Laskar ini menghadapi laskar Polongbangkeng di daerah Baro' Boso (Polongbangkeng pun membantu Tallo dan langsung dipimpin oleh Rajanya bernama Daenna I Pasairi Raja Polongbangkeng II). Laskar yang berada di bawah Panji Sulengkayya terdiri atas laskar Sudiang, Manuju, dan Borisallo menghadapi laskar Tallo di daerah Rappocini, sedangkan laskar yang berada di bawah Panji Cakkuridia yang terdiri atas laskar Data, Pattalasang, Bontomanai dan Paccele kang menghadapi laskar Marusu di daerah Tamamangung.

Meskipun akhirnya Tallo bersama sekutunya Marusu dan Polongbangkeng mengalami kelelahan namun berhasil memulihkan kembali hubungan kekeluargaan antara Kerajaan Gowa dan Tallo, bahkan ditandai dengan lahirnya sebuah perjanjian dan sumpah keramat antara Kerajaan Gowa dan Tallo, Sumpah Keramat itu berbunyi : "*Ia iannamo Ampasicalai Gowa na Tallo, lama nacalla Rewata*" artinya Barang siapa yang mengadu dombakan antara Gowa dan Tallo akan dikutuk oleh Dewata. Perjanjian inilah yang mempersatukan kembali antara Kerajaan Gowa dan Tallo yang pada hakekatnya memang Kerajaan Kembar (*zusterstaten*), sebab Raja Gowa IV Karaeng Tu Natangka' Lopi sebelum wafat membagi dua kerajaannya. Yang sulung Batara Gowa memperoleh bagian :

- a. Paccelekang
- b. Pattalassang
- c. Bontomanai Timur
- d. Bontomanai Barat
- e. Tombolo
- f. Mangasa

Daerah-daerah ini tetap bernama Kerajaan Gowa.

Yang bungsu bergelar Karaeng Loe Ri Sero memperoleh bagian :

- a. Saumata
- b. Pannampu
- c. Moncong Loe
- d. Parang Loe

Dengan lahirnya Perjanjian Perdamaian antara Kedua Kerajaan, maka Kerajaan Tallo menjadi bagian yang terintegrasi/terpisahkan dengan Kerajaan Gowa, sesuai konsepsi *Rua Karaeng Se're Ata* (Dua Raja Satu Hamba). Begitu pun dengan Kerajaan Marusu kembali menjadi teman yang dekat dengan kedua Kerajaan itu.

Sebagaimana kita ketahui sebuah kerajaan juga mengenal sistem stratifikasi sosial, dimana tingkatan ini mulai dikenal setelah kedatangan Tomanurung. Keturunan langsung Tomanurung merupakan satu lapisan terdiri yang akhirnya disebut bangsawan. Adapun stratifikasi sosial bagi masyarakat di Kerajaan Marusu secara umum terbagi atas:

- a. *Ana' Karaeng/Ana' Arung* (Golongan Bangsawan)
- b. *Tumaradeka/To Maradeka* (Golongan Rakyat Biasa)
- c. *Ata* (Golongan Hamba Budak)

Ketiga kelompok besar ini pun masih terbagi atas beberapa golongan, yaitu:

- a. *Ana' Karaeng/Ana' Arung* (Golongan Bangsawan). Golongan ini terdiri dari:
 - *Ana' Ti'no/Ana' Matase*, yaitu anak yang terlahir dari ayah maupun ibunya berdarah bangsawan murni.

Golongan ini terdiri lagi atas dua tingkatan yakni:

- *Ana' Pattola/Ana' Mattola*, adalah anak yang terlahir dari ayah seorang raja yang sementara bertahta dan ibu seorang permaisuri, sehingga anak ini menjadi calon utama pengganti ayah.
- *Ana' Manrapi*, adalah anak yang dapat diangkat menjadi raja jikalau tidak ada *ana' pattola/mattola*, disebut demikian karena anak tersebut adalah putra raja

dan ibunya seorang permaisuri namun anak tersebut lahir saat ayahnya belum memangkuk tahta atau pun sesudahnya, atau anak ini lahir dari saudara kandung raja.

- *Ana' Sipuwe* atau bangsawan berdarah setengah terdiri pula atas dua golongan, yaitu :
 - *Ana' Sipuwe Manrapi*, adalah anak yang dapat diangkat menjadi raja jika tidak ada *ana' pattola* dan anak manrapi atau kedua-duanya ada namun dianggap tidak cakap dalam mengendalikan pemerintahan atau mempunyai cacat lahir. Disebut *Ana' Sipuwe Manrapi*, karena terlahir dari ayah golongan *ana' ti'no/matase* (*Ana' pattola/mattola* atau *ana' manrapi*) tetapi ibunya dari golongan *ana' sipuwe manrapi* atau *ana' sipuwe*.
 - *Ana' Sipuwe* dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari perkawinan antara Ayah *ana' ti'no/matase*, Ibu golongan *Tumaradeka Tubaji* dan Ayah *ana' sipuwe manrapi*, Ibu golongan *ana' sipuwe*.
- *Ana' Cera/Ana' Dera* adalah anak yang terlahir dari perkawinan antara Ayah golongan *ana' ti'no* (*ana' pattola/matase* atau *ana' manrapi*) dan Ibu golongan *Ata* atau golongan budak atau pun Ayah golongan *ana' sipuwe* tetapi Ibu golongan *Tumaradeka Tusamara/Tu Sama'*. Golongan ini sama sekali sudah tidak berhas atas tahta.
- *Ana' Karaeng Sala* adalah anak yang lahir dari Ayah *ana' sipuwe* atau *ana' cera'* dan Ibu golongan *Ata* (Budak).
- b. *Tumaradeka/To Maradeka* (Golongan Rakyat Biasa). Kasta atau golongan ini terdiri dari dua tingkatan yaitu :

- *Tubaji/Tu Deceng* adalah golongan rakyat biasa terhormat atau tidak diperhambakan. Golongan ini seringkali juga menggunakan gelar Daeng di belakang namanya. Dalam pemerintahan golongan ini biasanya menjabat sebagai *Gelarang/Matowa* atau Kepala Kampung.
 - *Tusamara'/To Sama'* adalah golongan kebanyakan/rakyat lapisan terbawah yang tidak berhak menggunakan tambahan nama Daeng di belakang namanya, terkecuali sebagai penghargaan karen diperistrikan oleh seorang bangsawan.
- c. *Ata* (Golongan Hamba/Budak). Golongan ini ialah Budak/Hamba Sahaya yang mengabdikan pada Raja/Bangsawan, golongan ini terdiri dari dua yaitu :
- *Ata Sossorang/Ata Mana'* adalah budak atau hamba sahaya yang diwariskan secara turun temurun, sebagaimana halnya dengan barang pusaka/warisan.
 - *Ata nibuang/Ata Ma'buang* adalah golongan yang dijadikan budak karena sesuatu kesalahan atau aib yang diperbuatnya atau karena menjadi tawanan perang, sehingga dijadikan budak oleh yang menawanannya.

Stratifikasi sosial diatas sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di Kerajaan Marusu. Namun ketika Marusu mulai dikuasai secara total oleh Belanda nampaknya untuk kedudukan tahta, pemerintah Belanda tidak terlalu memperhatikan ketinggian derajat kebangsawanan namun lebih menitikberatkan kepada siapa dekade akhir di Marusu, khususnya *Toddo Limaya Ri Marusu*, kebangsawanan identik dengan derajat darah kebangsawanan, sehingga untuk mengetahui derajat kebangsawanan seorang Raja/Bangsawan adalah memeriksa silsilah keturunannya.

2.3 Masa Kolonialisme di Kabupaten Maros

Kota Maros pada masa pemeritahan Belanda berpusat di Turikale. Pusat Kota Maros ditandai oleh sebaran bangunan, baik bangunan perkantoran, jaringan jalan, maupun rumah tinggal. Elemen Kota Kolonial Maros paling tidak meliputi beberapa bentuk fasilitas bendungan, jaringan jalan, jembatan, bangunan pertahanan dan keamanan, bangunan perkantoran, lapangan, pemakaman, sarana ibadah, pasar dan Pecinan, bangunan sekolah, rumah tinggal, bangunan kesehatan, fasilitas rekreasi, dan Bandar Udara (Kadieng).

Berdasarkan hubungan antara fungsi bangunan dengan letak bangunan, tata kota Maros masa kolonial dapat dibedakan menjadi beberapa ruang, yaitu : (1) Ruang Pemerintahan dan pelayanan umum, (2) Ruang Bisnis, (3) Ruang Pemukiman (4) Ruang Pemakaman, (5) Ruang Ibadah, (6) Ruang Pertahanan dan Keamanan, (7) Ruang Persawahan, (8) Ruang Rekreasi dan Hiburan. Ruang pemerintahan dan pelayanan umum diwakili oleh bangunan perkantoran, rumah sakit, Kantor Kejaksaan Maros, Kantor *Landraad*, Kantor *Controleur* (Kantor Camat Turikale), Kantor *Poost*, Kantor Pekerjaan Umum, Kantor Pemerintahan Belanda, dan Kantor Karaeng Turikale. Ruang pertahanan dan keamanan diwakili oleh bangunan penjara *Beheaderd Huis van Berawing* Maros dan *Pesangrahan Pradjoeritz* (Tangsi Polisi) (Nur dkk, 2014: 89-91).

Besaran Kota Kolonial Maros yang merupakan kota *Onder Afdelling*⁷ memang berbeda dengan Makassar yang merupakan *Afdelling* dan pusat pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia Timur. Meskipun besaran kota Maros lebih kecil tetapi dalam perspektif akademik, Kota Kolonial Maros tetap merupakan data penting karena merupakan kota penyangga, kota teritorial, dan kota *garnisun*⁸ dari Kota Makassar (Nur dkk, 2014: 95-96).

⁷ *Onder Afdelling* adalah suatu wilayah administrative yang diperintah oleh seorang wedana bangsa Belanda yang disebut kontrolir pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

⁸ *Garnisun* adalah bagian angkatan bersenjata yang mempunyai kedudukan atau tempat pertahanan yang tetap (dalam sebuah benteng) dan tempat kedudukan tentara.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Pada bagian ini akan membicarakan tentang deskripsi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pemaparan data yang dilakukan oleh penulis di bagian ini yaitu antara lain, nama bangunan, lokasi, letak astronomis, fungsi bangunan, jumlah ruang di setiap bangunan, dan juga langgam arsitektur yang masih bertahan pada bangunan tersebut. Adapun hasil data penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Tinggalan Bangunan Perkantoran Masa Kolonial Belanda di Kabupaten Maros

No.	Nama Bangunan	Tahun	Titik Koordinat (Astronomis)	Lokasi/Jalan
1.	Kantor Kejaksaan Maros	1918	LS : 05° 00' 22,0" BT : 119° 34' 26,9"	Jalan Lanto Dg. Pasewang
2.	Kantor <i>Landraad</i>	1918	LS : 05° 00' 21,8" BT : 119° 34' 27,8"	Jalan Lanto Dg. Pasewang
3.	Kantor <i>Controleur</i> Belanda	1835	LS : 05° 00' 22,4" BT : 119° 34' 28,8"	Jalan Ahmad Yani
4.	Kantor Pemerintahan Belanda	1905	LS : 05° 00' 23,4" BT : 119° 34' 39,8"	Jalan Sultan Hasanuddin
5.	Kantor <i>Poost</i>	1925	LS : 05° 00' 19,8" BT : 119° 34' 27,3"	Jalan Abbas Dg. Sialu
6.	Gudang Peralatan Kantor	1923	LS : 05° 00' 19,7"	Jalan Baddare Dg. Situru

	<i>Landraad</i>		BT : 119° 34' 29,5"	
7.	Kantor Karaeng Turikale	1928	LS : 05° 00' 25,6" BT : 119° 34' 48,9"	Jalan Sultan Hasanuddin

3.1 Bangunan Bekas Mess Pegawai Kejaksaan (Kantor Kejaksaan Maros)

Secara administratif bangunan ini berada di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale. Secara astronomis berada pada titik koordinat 05° 00' 22,0" LS dan 119° 34' 26,9" BT.



Foto 1. Kantor Kejaksaan Tampak Depan (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Adapun bangunan pada sebelah selatan berbatasan dengan bangunan Masjid Agung Maros, Polres Maros, dan Jalan Poros. Sebelah timur berbatasan dengan bangunan *Landraad* dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sebelah barat berbatasan dengan kantor DPRD sedangkan untuk sebelah utara berbatasan dengan Jalan Abbas Dg Sialu dan pemukiman penduduk.

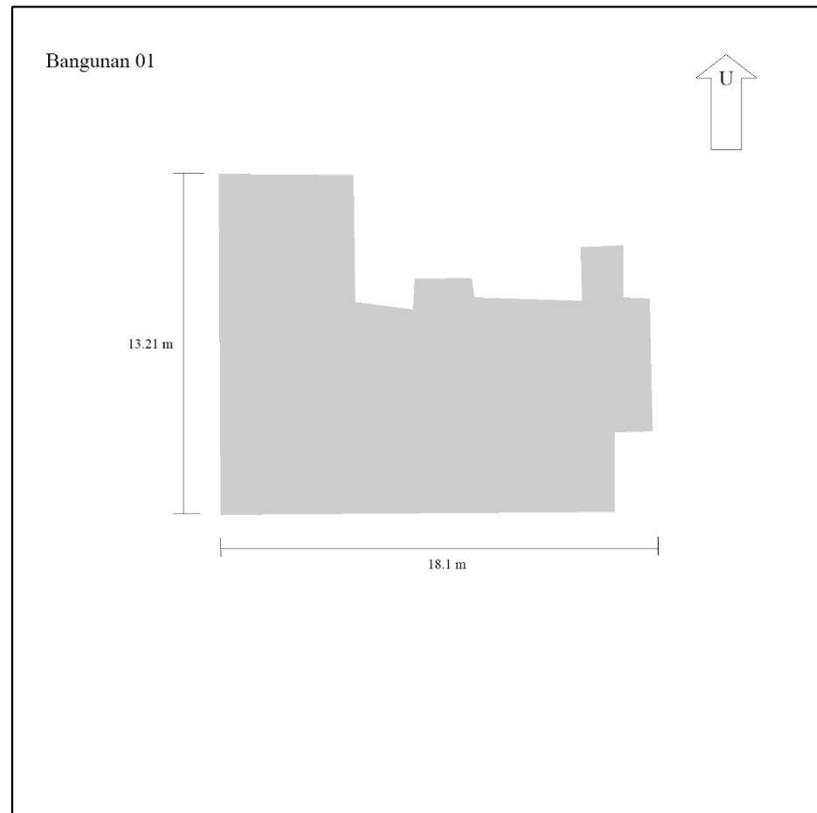


Foto 2. Kantor Kejaksaan Tampak Belakang (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Dalam laporan penelitian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Maros, kantor ini dibangun sejak tahun 1918 (Nur dkk, 2014: 46).



Foto 3. Kantor Kejaksaan Tampak Barat (Dok. Lia Islamiah, 2019)



Denah 1. Kantor Kejaksaan Maros (Digambar oleh Muh. Hafdal Hasbi, 2019)

Bangunan ini terbilang cukup terawat dan sekarang sudah menjadi rumah hunian. Ciri arsitektur bangunan yang masih bertahan pada bangunan ini yaitu pintu dan jendela khas model *jalusi/krepyak*⁹ berdaun ganda. Dalam hal pembagian ruangan tidak dapat di deskripsikan dikarenakan pemilik rumah sudah pindah, sehingga untuk akses masuk ke rumah tersebut tidak bisa dilakukan. Bangunan ini sejaman dengan bangunan yang berada di Kota Madiun yaitu bangunan Rumah Dinas Bakorwil didirikan pada tahun 1900, bangunan yang berada di Kota Magelang yaitu bangunan Rumah Tinggal Keluarga Ko Som Ien dan Ko Kwat Ie didirikan pada awal abad 19, serta bangunan yang berada di Kota Makassar yaitu

⁹ *Jalusi/krepyak* adalah jendela atau pintu yang terbuat dari kayu dengan bentuk papan yang memanjang di seluruh bidang dengan posisi miring sehingga membentuk celah-celah diantaranya.

bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang didirikan tahun 1915 dimana pintu dan jendelanya yang memiliki khas model *jalusi/krepyak*.

Bangunan ini tidak mengalami pemugaran, hanya saja yang berubah pada bangunan ini yaitu atap dan jendela pada bagian depan diganti dengan bahan kaca. Menurut informasi dari Kepala Museum Daerah Maros yang juga selaku staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros mengatakan bahwa bahan atap telah diganti menjadi seng modern.

3.2 Rumah Dinas Pegawai Pengadilan (Kantor *Landraad*)

Secara administratif Kantor *Landraad* berada di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale. Secara astronomis terletak pada 05° 00' 21,8" LS dan 119° 34' 27,8" BT.



Foto 4. Kantor *Landraad* Tampak Depan (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Pada sebelah selatan bangunan berbatasan dengan Bundaran Tugu Kupu-Kupu. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sebelah barat berbatasan dengan bangunan Kejaksaan dan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Abbas Dg Sialu dan pemukiman penduduk.



Foto 5. Kantor *Landraad* Tampak Timur (Dok. Lia Islamiah, 2019)

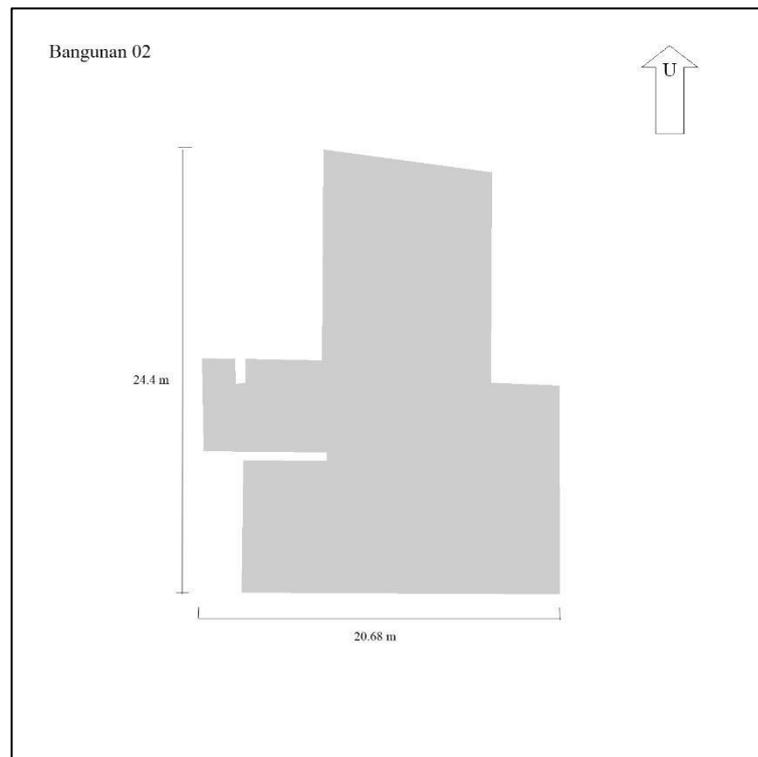
Bangunan situs cukup terawat dan sekarang sudah menjadi rumah hunian yang ditinggali oleh pegawai pengadilan Maros. Ciri arsitektur kolonial yang masih bertahan pada bangunan ini yaitu pintu khas model pintu berdaun ganda. Selain itu yang paling menonjol adalah model atap limas.



Foto 6. Kantor *Landraad* Tampak Belakang (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Untuk ruangan terdapat beberapa pembagian ruangan, seperti ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, dan gudang.

Bangunan ini belum pernah dipugar kecuali atap dan jendelanya. Bahan atap yang awalnya genteng diganti menjadi seng yang modern. Jendelanya yang awalnya kayu diganti menjadi kaca.



Denah 2. Kantor *Landraad* (Digambar oleh Muh. Hafdal Hasbi, 2019)

3.3 Museum Daerah Maros (Kantor *Controleur* Belanda)

Secara administratif Kantor *Controleur* atau sekarang difungsikan sebagai Museum Daerah Maros ini berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale. Secara astronomis $05^{\circ} 00' 22,4''$ LS dan $119^{\circ} 34' 28,8''$ BT.



Foto 7. Kantor *Controleur* Belanda Tampak Depan (Dok. Lia Islamiah, 2019)



Foto 8. Kantor *Controleur* Belanda Tampak Timur (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Sebelah selatan bangunan berbatasan dengan Polres Maros. Sebelah timur berbatasan dengan SD Negeri 2 Unggulan Maros. Pada sebelah barat berbatasan

dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sedangkan sebelah utara bangunan berbatasan dengan Jalan Baddare Dg Situru dan pemukiman penduduk.



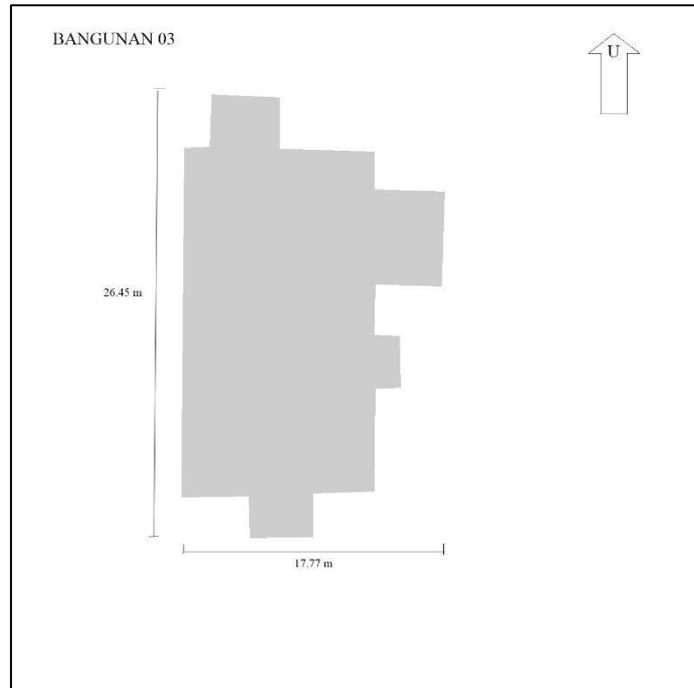
Foto 9. Papan Nama Museum Daerah Maros (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Pada masa pemerintahan Belanda kantor ini dibangun pada tahun 1835. Bangunan beberapa kali sudah beralih fungsi mulai dari Kantor Kepala Pemerintahan Negeri Maros, Rumah Sakit Bersalin, Kantor Bappeda Maros, Kantor Camat Turikale, dan sekarang menjadi Museum Daerah Maros (lihat foto 9). Bangunan ini secara legalitas telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana yang terlihat pada papan pengumuman di sebelah timur jalan masuk bangunan ini (lihat foto 10) (Nur, dkk, 2014: 65).



Foto 10. Papan Pengumuman Cagar Budaya Museum Daerah (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Bangunan ini mengalami pemugaran dan penambahan di bagian depan. Kusen pintu dan jendela bagian depan, timur, barat, dan belakang telah diganti. Tetapi pintu yang memiliki khas model *jalusi/krepyak* berdaun ganda pada ruangan koleksi belum pernah diganti. Plafon sebagian besar sudah diganti.



Denah 3. Kantor *Controleur* Belanda (Digambar oleh Muh. Hafdal Hasbi, 2019)

Bangunan ini sejaman dengan bangunan yang berada di Kota Madiun yaitu bangunan Rumah Dinas Bakorwil didirikan pada tahun 1900, bangunan yang berada di Kota Magelang yaitu bangunan Rumah Tinggal Keluarga Ko Som Ien dan Ko Kwat Ie didirikan pada awal abad 19, serta bangunan yang berada di Kota Makassar yaitu bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang didirikan tahun 1915 dimana pintu dan jendelanya yang memiliki khas model *jalusi/krepyak*.

3.4 Posko Siaga Aliansi Tanggap Bencana (Kantor Pemerintahan Belanda)

Secara administratif Kantor Pemerintahan Belanda berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale. Secara astronomis bangunan ini terletak pada $05^{\circ} 00' 23,4''$ LS dan $119^{\circ} 34' 39,8''$ BT.



Foto 11. Kantor Pemerintahan Belanda Tampak Depan (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Bangunan ini pada sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga, sebelah barat bangunan berbatasan dengan rumah warga, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kelapa dan rumah warga, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan rumah warga.



Foto 12. Kantor Pemerintahan Belanda Tampak Atap (Dok. Lia Islamiah, 2019)

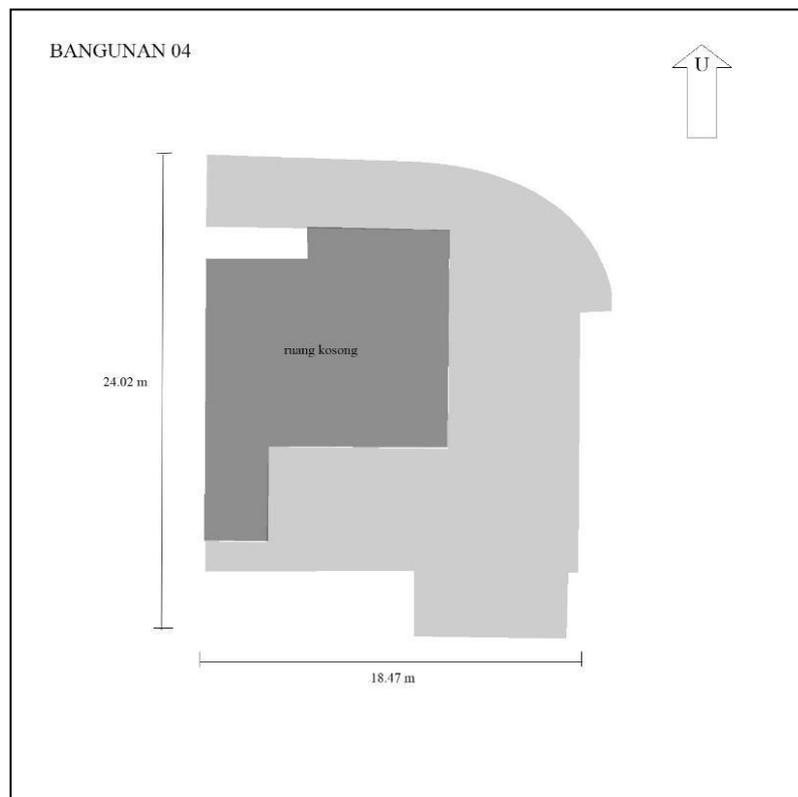
Ciri arsitektur yang masih bertahan adalah pintu, jendela khas model *jalusi/krepyak* dan ventilasi puncak atap (*uilonzorder*) (lihat foto 12). Bangunan sudah mengalami pemugaran dan kondisi bangunan tidak terawat. Ruangan pada bangunan ini berjumlah enam, untuk keterangan ruangan apa saja yang ada di dalam tidak dapat di deskripsikan karena kurang tertata.



Foto 13. Papan Pengumuman Cagar Budaya Kantor Pemerintahan Belanda (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Bangunan ini dibangun pada tahun 1905. Bangunan ini beberapa kali sudah beralih fungsi mulai dari Kantor Pemerintahan Belanda, Rumah Sakit kecil

(Puskesmas), Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Dinas Kependudukan, Kantor Cabang Pramuka Maros dan sekarang menjadi Posko Siaga Bencana Kabupaten Maros. Sama halnya dengan kantor camat Turikale, bangunan ini pun telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Maros sejak tahun 2003 (lihat foto 13).



Denah 4. Kantor Pemerintahan Belanda (Digambar oleh Muh.Hafdal Hasbi, 2019)

Bangunan ini dipugar bagian halaman depan atau teras. Dan ada penambahan bangunan di sebelah timur. Atap sudah diganti yang awalnya bahan dari genteng diganti menjadi bahan seng modern, lantai pun sudah diganti. Yang belum diganti pintu dan jendela.

Bangunan ini sejaman dengan bangunan yang berada di Kota Madiun yaitu bangunan Rumah Dinas Bakorwil didirikan pada tahun 1900, bangunan yang

berada di Kota Magelang yaitu bangunan Rumah Tinggal Keluarga Ko Som Ien dan Ko Kwat Ie didirikan pada awal abad 19, serta bangunan yang berada di Kota Makassar yaitu bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang didirikan tahun 1915 dimana pintu dan jendelanya yang memiliki khas model *jalusi/krepyak*.

3.5 Kantor Pos (*Post Cantoor*)

Secara administratif Kantor Pos ini berada di Jalan Abbas Dg. Sialu, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale. Secara astronomis terletak pada $05^{\circ} 00' 19,8''$ LS dan $119^{\circ} 34' 27,3''$ BT.



Foto 14. *Post Cantoor* Tampak Depan (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Bangunan ini pada sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga, sebelah barat bangunan berbatasan dengan rumah warga, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kelapa dan rumah warga, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan rumah warga.



Foto 15. *Post Cantoor* Tampak Barat (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Ciri arsitektur yang masih bertahan dan masih terjaga keasliannya, terlihat pada bentuk atap trapesium, jendela dan pintu, ventilasi, serta denah yang berbentuk simetris.



Foto 16. *Post Cantoor* Tampak Timur (Dok. Lia Islamiah, 2019)

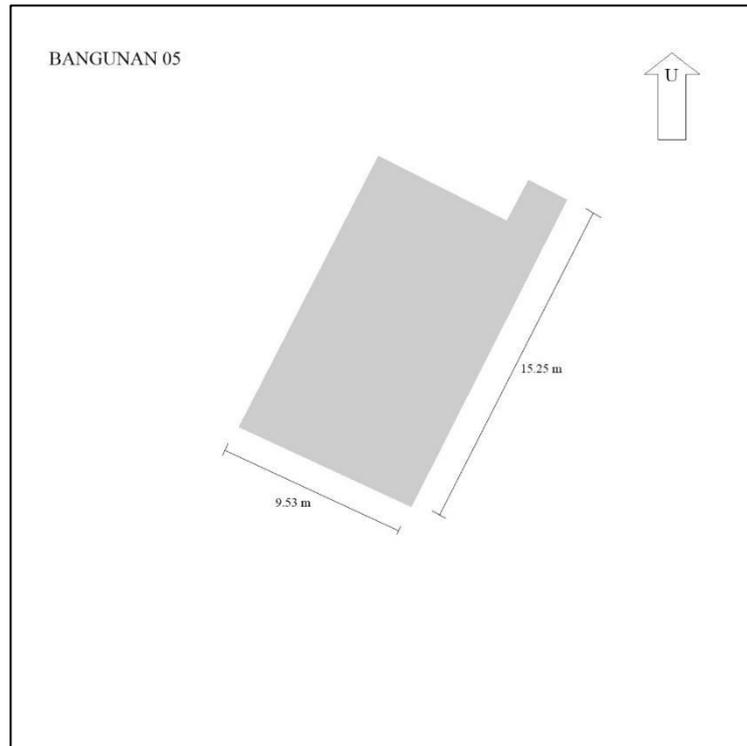
Bangunan sudah mengalami pemugaran. Kusen pintu dan jendela telah diganti dengan bahan yang lebih modern, pada bagian pintu dan jendela depan diganti menjadi pintu kaca, dan jendela pun demikian baik itu di sebelah timur,

barat, maupun selatan. Yang masih terjaga keasliannya yaitu pada bangunan Kantor Pos itu sendiri yang belum diganti. Kondisi bangunan terawat.



Foto 17. *Post Cantoor* Tampak Belakang (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Bangunan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1925, sejaman dengan didirikannya Kantor Pos Divisi Ekspedisi yang ada di Kota Makassar dilihat dari kesamaan yang memiliki ventilasi ruangan yang banyak. Dari awal dibangun, bangunan ini tetap dipergunakan sebagai Kantor Pos. Kantor Pos ini dulunya difungsikan sebagai tempat pengiriman surat-surat atau laporan. Surat yang pernah dikirim seperti surat dari pemerintah Kolonial Belanda di Maros ke Resident di Makassar pada umumnya, surat-surat yang dikirim berupa laporan-laporan tentang keadaan politik di daerah Maros, tentang partai-partai atau aksi-aksi. Yang dilakukan oleh pemberontak, kegiatan keagamaan (Imlek yang dirayakan orang Tionghoa dan Maulid oleh orang muslim), laporan tentang keadaan politik dan sebagainya, biasanya dikirim setiap lebih dari 10 hari, mereka melaporkan tentang keadaan daerah Maros (Nur dkk, 2014:66).



Denah 5. *Post Cantoor* (Digambar oleh Muh.Hafdal Hasbi, 2019)

3.6 Kantor Pekerjaan Umum Lama (Gudang Peralatan Kantor *Landraad*)

Secara administratif Kantor Pekerjaan Umum Lama berada di Jalan H. M. Kasim, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale. Secara astronomis bangunan ini terletak pada $05^{\circ} 00' 19,7''$ LS dan $119^{\circ} 34' 29,5''$ BT.



Foto 18. Gudang Peralatan Kantor *Landraad* Tampak Depan (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Pada sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Baddare Dg Situru, Museum Daerah Maros, dan Kantor Kodim. Sebelah utara berbatasan dengan rumah kodok (*Quenshead*). Sebelah timur berbatasan dengan lahan kosong dan rumah penduduk. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Jalan H. Muh. Kasim dan asrama kodim.



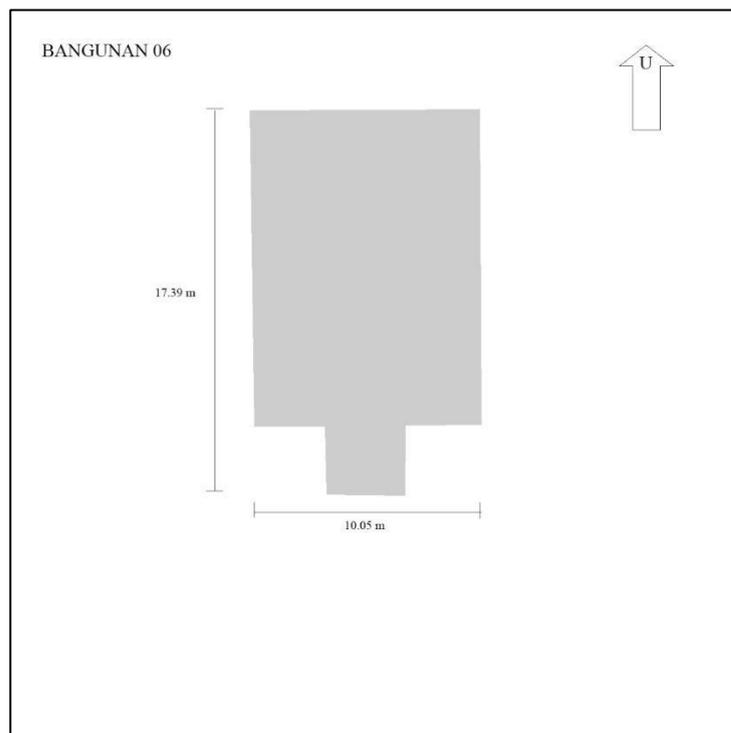
Foto 19. Gudang Peralatan Kantor *Landraad* Tampak Barat (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Ciri arsitektur yang masih bertahan pada bangunan ini adalah jendela dan pintu daun berganda dua (lihat foto 20), bentuk atap, serta ventilasi berbentuk *jalusi/krepyak*. Ruangan pada bangunan ini berjumlah empat dan kurang tertata.



Foto 20. Pintu Depan Gudang Peralatan Kantor *Landraad* (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Bangunan ini didirikan pada tahun 1923 dan berfungsi sebagai gudang peralatan dan perlengkapan dari Kantor *Landraad* Maros. Bangunan ini beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan untuk alat berat.



Denah 6. Gudang Peralatan Kantor *Landraad* (Digambar oleh Muh.Hafdal Hasbi, 2019)

Bangunan ini telah mengalami pemugaran pada jendela yang sudah diganti memakai kaca, dan atap diganti memakai bahan seng modern, yang masih bertahan dan belum pernah diganti adalah pintu. Denah bangunan juga masih simetris.

Bangunan ini sejaman dengan bangunan yang berada di Kota Madiun yaitu bangunan Rumah Dinas Bakorwil didirikan pada tahun 1900, bangunan yang berada di Kota Magelang yaitu bangunan Rumah Tinggal Keluarga Ko Som Ien dan Ko Kwat Ie didirikan pada awal abad 19, serta bangunan yang berada di Kota Makassar yaitu bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang didirikan

tahun 1915 dimana pintu dan jendelanya yang memiliki khas model *jalusi/krepyak*.

3.7 Bekas Kantor Kelurahan Karaeng Turikale (Kantor Karaeng Turikale)

Secara administratif Kantor Karaeng Turikale berada di Jalan Poros Makassar-Bone, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale. Secara astronomis bangunan ini terletak pada $05^{\circ} 00' 25,6''$ LS dan $119^{\circ} 34' 48,9''$ BT.



Foto 21. Kantor Karaeng TurikaleTampak Depan (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Bangunan ini pada sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Makassar Bone. Sebelah utara berbatasan rumah penduduk. Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Langsung dan rumah penduduk.



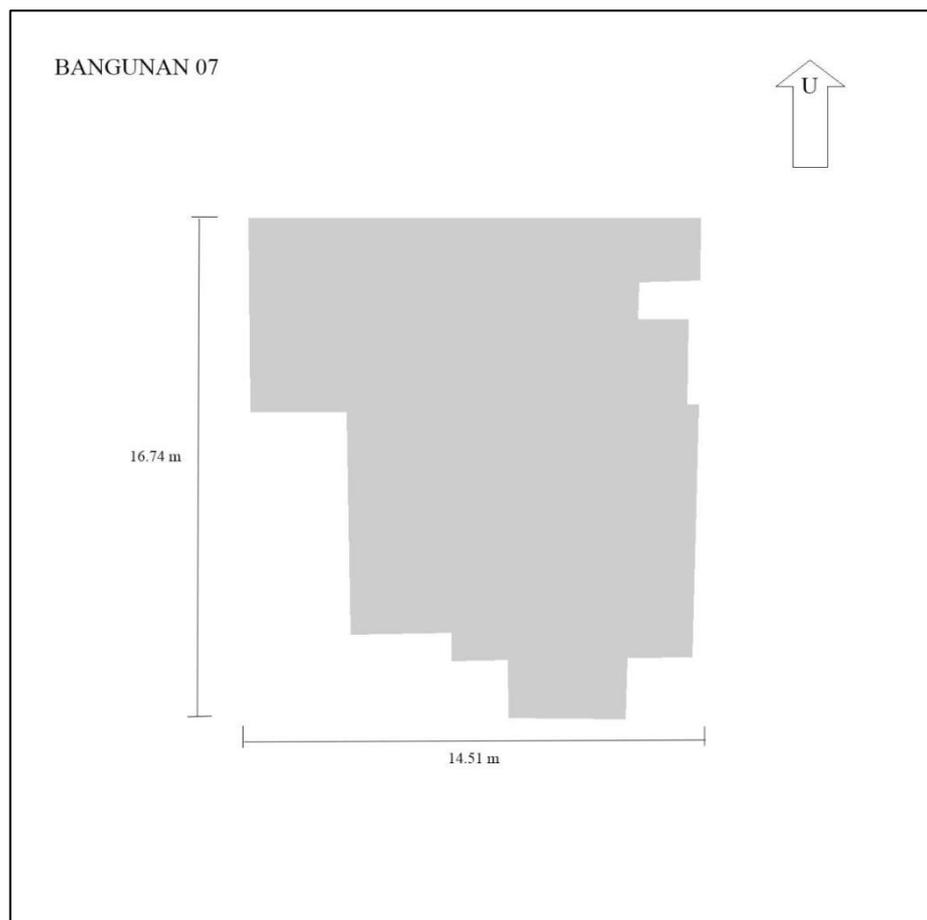
Foto 22. Kantor Karaeng Turikale Tampak Barat (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Ciri arsitektur yang masih bertahan pada bangunan ini adalah jendela yang khas model *jalusi/krepyak*, pintu yang berdaun ganda, bentuk atap yang trapesium, dan denah. Untuk keterangan ruangan apa saja yang ada di dalam tidak dapat dideskripsikan karena bangunan terkunci dan sudah tidak terpakai lagi.



Foto 23. Kantor Karaeng Turikale Tampak Belakang (Dok. Lia Islamiah, 2019)

Bangunan ini diperkirakan dibangun pada tahun 1928. Bangunan ini beberapa kali beralih fungsi, mulai dari Kantor Karaeng Turikale, Rumah Hunian, Kantor Cabang Pramuka Maros, Kantor Kelurahan Turikale, dan sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Kondisi bangunan tidak terawat.



Denah 7. Kantor Karaeng Turikale (Digambar oleh Muh.Hafdal Hasbi, 2019)

Bangunan ini mengalami pemugaran di bagian atap, dimana atap tersebut sudah diganti memakai seng modern. Yang bertahan adalah jendela dan pintu yang belum diganti. Bangunan ini sejaman dengan bangunan yang berada di Kota Madiun yaitu bangunan Rumah Dinas Bakorwil didirikan pada tahun 1900, bangunan yang berada di Kota Magelang yaitu bangunan Rumah Tinggal

Keluarga Ko Som Ien dan Ko Kwat Ie didirikan pada awal abad 19, serta bangunan yang berada di Kota Makassar yaitu bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang didirikan tahun 1915 dimana pintu dan jendelanya yang memiliki khas model *jalusi/krepyak*.

BAB IV
POLA PENEMPATAN BANGUNAN PERKANTORAN
MASA KOLONIAL BELANDA
DI KABUPATEN MAROS

4.1 Interpretasi Pola Penempatan Bangunan

Kolonialisasi di Kabupaten Maros tidak hanya meninggalkan catatan dalam bentuk tulisan sebagai bukti sejarah, namun juga meninggalkan banyak bangunan sebagai bentuk warisan budaya sekaligus sebagai bukti arkeologi. Bukti selanjutnya menjadi kajian arkeologi untuk menggali informasi masa lampau dalam menjelaskan budaya manusia pendukung kebudayaan tersebut, termasuk mengamati perubahan budaya yang terjadi. Berkaitan dengan hal ini, penulis mencoba menggambarkan pola penempatan bangunan perkantoran dan faktor yang melatarbelakangi penempatannya, berdasarkan fase keruangan Kabupaten Maros masa kolonial. Dalam hal ini, bentuk pembahasan akan dibagi menjadi dua yaitu mengenai pola keletakan bangunan dan interpretasi pola penempatan bangunan.

Sebuah kota atau wilayah akan lebih lengkap apabila semua faktor kehidupan masyarakatnya terpenuhi, adapun salah satu faktornya yaitu di bidang politik. Faktor di bidang politik tersebut adalah dengan adanya bangunan perkantoran yang mendukung lajunya sistem pemerintahan di Kabupaten Maros, serta menandakan betapa besar kepentingan politis pemerintah Belanda untuk membangun daerah yang aman dan tenteram atau menciptakan suasana tertib dan teratur di Kabupaten Maros (Jarnia, 2010: 71).

Kota pada dasarnya merupakan hasil adaptasi sekelompok manusia dalam jumlah yang besar terhadap lingkungan budaya dan alamnya. Kata kota berasal dari kata *kuta* yang secara harfiah berarti daerah pemukiman yang dikelilingi tembok berbentuk persegi (Nas, 1989:23 dan Wiryomartono, 1995:22 dalam Marzuki 2018:43). Kota Indonesia awal merupakan kota-kota kerajaan yang terdapat di pedalaman, dan merupakan pusat kerajaan-kerajaan sebelum bangsa Eropa menguasai Indonesia.

Kota Indis merupakan kota periode awal bangsa Belanda berkuasa di Indonesia. Pola dan struktur kota mengikuti pola-pola kota yang ada di Belanda dikombinasikan dengan kebudayaan lokal Indonesia. Kota kolonial merupakan kota yang bercirikan Eropa, berkembang mulai tahun 1870-an dan terdapat pemisahan lokasi hunian yang jelas berdasarkan struktur sosial masyarakatnya. Kota modern merupakan kota yang lahir setelah masa kemerdekaan Indonesia (Nas, 1986:6-9 dan Gill, 1997:60 dalam Marzuki 2018:43)

Kota kolonial ditandai dengan benteng dan barak, perkantoran dan rumah-rumah, gedung *societiet*, rumah ibadah *vrijmetselarij*. Selain, itu kota-kota keresidenan dijamin sebelum perang banyak menunjukkan aktivitas social dan kultural yang menandainya sebagai sebuah kota kolonial. Kajian kota kolonial adalah memperkuat peran dan hegemoni pemerintah kolonial dalam berbagai bidang. Kajian ini juga memberikan gambaran tentang pemerintahan kolonial, fasilitas perumahan dan perkantoran, transportasi dan komunikasi, perdagangan, sarana pendidikan dan kesehatan. Sejarah kota kolonial biasanya lebih cenderung memperhatikan peran utama pihak kolonial sebagai penggerak sejarah termasuk

dalam pembangunan perkotaan dan mengenyampingkan sumbangsih dari peranan warga lokal dalam perkembangan itu.

Pada saat pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Maros, Maros merupakan sebuah distrik yang dipimpin oleh seorang *controleur* dan tugas kontrolir adalah mengawasi, mengatur dan memberikan tugas-tugas, serta perintah untuk dilaksanakan kepada *regent*. Tugas *regent* adalah wajib memperkuat polisi rakyat, melaporkan dengan jelas dan lengkap hal ikhwal pemerintahan di daerahnya, melangsungkan dan memberikan perintah kepada bawahannya kepala kampung atau polisi kampung, dan wajib pula mengunjungi dan mengawasi langsung kegiatan di wilayah pemerintahannya. Struktur pemerintahan Hindia Belanda terdiri dari Gubernur Jenderal, *Resident*, Asisten *Resident*, dan *Regent* (Jarnia, 2010:33).

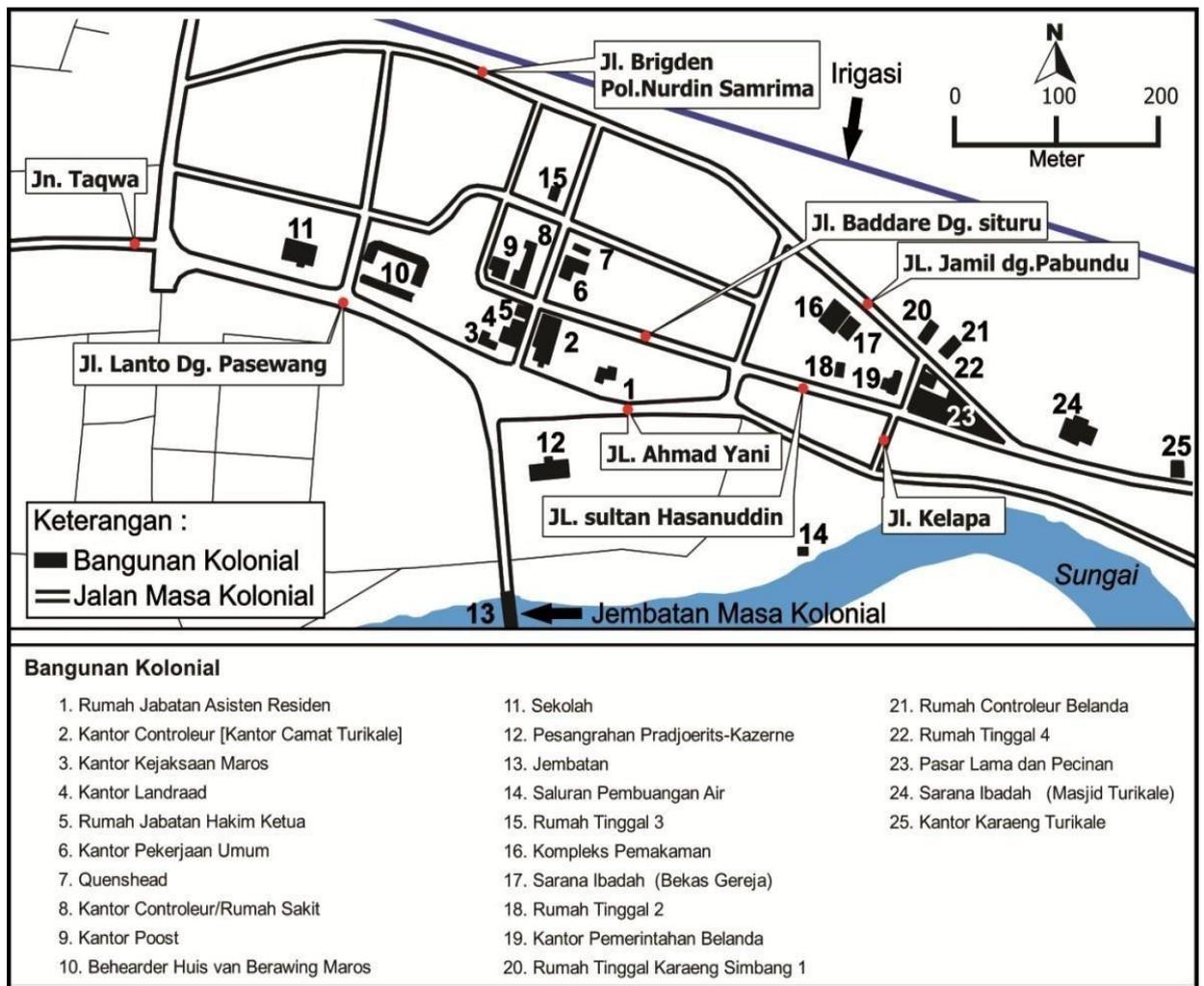
Berdasarkan data peta sebaran bangunan (lihat peta 3) diatas hubungan atau fungsi bangunan dengan letak bangunan, tata Kota Maros masa Kolonial dapat dibedakan menjadi beberapa ruang, yaitu: Ruang Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Ruang Bisnis, Ruang Pemukiman, Ruang Pemakaman, Ruang Ibadah, Ruang Pertahanan dan Keamanan, Ruang Persawahan, Ruang Rekreasi dan Hiburan. Ruang Pemerintahan dan Pelayanan Umum diwakili oleh bangunan perkantoran, rumah sakit, Kantor Kejaksaan Maros, Kantor *Landraad*, Kantor *Controleur*, Kantor *Poost*, Kantor *Controluer*, Kantor Pekerjaan Umum, Kantor Pemerintahan Belanda, dan Kantor Karaeng Turikale.

Ruang bisnis diwakili oleh ruang bangunan Pecinan, pasar Redaberu di Turikale. Ruang pemukiman diwakili oleh sejumlah rumah tinggal. Ruang pemakaman dicirikan oleh beberapa kompleks makam secara terpisah. Ruang ibadah diwakili oleh dua masjid besar (Masjid Kassikebo dan Masjid Turikale). Ruang pertahanan dan keamanan diwakili oleh bangunan penjara *Behearder Huis van Berawing* Maros dan *Pesangrahan* Prajurit (Tangsi Polisi). Ruang persawahan diwakili oleh hamparan sawah yang terlihat di sepanjang jalan menuju arah ke Pangkep dan arah Bantimurung. Ruang rekreasi diwakili oleh Bantimurung dan arena pacuan kuda (Nur dkk, 2014:91).

Semua ruang tersebut tidak terpisah antara satu ruang dengan ruang yang lainnya karena ruang-ruang tersebut tersebar secara acak dan jelas bahwa ruang pemerintahan dan pelayanan umum, ruang bisnis, ruang pemukiman, ruang pemakaman, ruang ibadah, dan ruang kantor pertahanan dan keamanan berada di wilayah inti kota yang jaringan jalannya telah terencanakan oleh pemerintah Belanda. Perencanaan tata ruang pada bangunan-bangunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dilihat dari segi, topografi, pengawasan kegiatan politik, pengawasan keamanan, pemisahan kegiatan perdagangan, pemisahan kehidupan sosial, pemisahan kehidupan budaya, pemisahan ras dan agama (Heryanto, 2011 dalam Nur dkk, 2011:92).

Perkembangan kota adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda. Sorotan perubahan keadaan tersebut biasanya didasarkan pada waktu yang berbeda dan untuk analisa ruang yang sama. Proses dapat berjalan secara alami atau secara

proses perubahan yang berjalan secara artifisial, dimana campur tangan manusia mengatur arus perubahan keadaan tersebut. Sehubungan dengan hal ini, tinjauan perkembangan pola dan struktur ruang fisik kota itu sendiri dapat ditinjau dari berbagai macam aspek kehidupan perkotaan, misalnya kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya (Yunus, 1994 dalam dalam Feri 2010:10).



Gambar 3. Peta Sebaran Bangunan dan Jalan Masa Kolonial Kabupaten Maros
 Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros (Dok. Muhammad Nur, 2014)

Setiap keletakan bangunan dominan berdekatan sehingga memudahkan untuk mencapai satu hubungan dengan bangunan lainnya, yang artinya membuat penduduk pada masanya dapat mencapai setiap bangunan dengan berjalan kaki. Keletakan yang dimaksud adalah tempat atau lokasi pendirian temuan berdasarkan letak geografis yang ditemukan dalam suatu wilayah tertentu. Suatu keletakan dapat diamati berdasarkan orientasi dan arah hadap suatu temuan (Lenrawati, 2016:121).

Bangunan perkantoran terletak di pusat Kabupaten Maros. Bangunan perkantoran seperti Kantor Kejaksaan, Kantor *Landraad*, dan Kantor *Controleur* Belanda berdekatan dengan bangunan kolonial lainnya yaitu di sebelah ujung barat berbatasan dengan *Behearder Huis van Berawing* Maros (Lembaga Lama) dan sekolah mengikuti pola jalan yaitu Jalan Lanto Dg. Pasewang yang dulunya Jalan Masjid Raya di tahun 1965, sebelah selatan berbatasan dengan *Pesangrahan Pradjoeritz Kazerne* (Tangsi Polisi) dan jalan poros, yang melintang ke sebelah timur berbatasan pula dengan Rumah Jabatan Asisten *Resident* yang berada di jalan Jalan Jenderal Ahmad Yani yang dulunya Jalan Jenderal Sudirman pada tahun 1965 serta sebelah utara berbatasan dengan bangunan Rumah Jabatan Hakim Ketua.

Bangunan Kantor *Poost* dan Kantor PU Lama atau yang dulunya sebagai Gudang Peralatan dari Kantor *Landraad* berdekatan dengan bangunan kolonial seperti Kantor *Controleur*/Rumah Sakit atau yang sekarang dijadikan sebagai perumahan kodim tepatnya di sebelah timur, dan di sebelah utara berbatasan dengan *Quenshead* atau sekarang digunakan sebagai Rumah Dinas Pegawai Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Abbas Dg. Sialu. Sedangkan

di sebelah utara Kantor Pemerintahan Belanda berdekatan dengan bangunan Rumah *Controleur* Belanda yang berada di Jalan Jamil Dg.Pabundu dan Kantor Karaeng Turikale yang letaknya di Jalan Sultan Hasanuddin yang dulunya Jalan Abdul Hamid di tahun 1970, berdekatan beberapa meter dari bangunan yang berada di sebelah barat yaitu Rumah *Controleur* Belanda (lihat peta 4).

Kota secara administratif merupakan wilayah yang luas dengan batas-batas wilayah yang telah disepakati atau telah diatur oleh pemerintah pusat *de facto* maupun *de jure*. Kota pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat luas adalah suatu tempat yang menjadi inti dari wilayah kota secara administratif itu. Tempat yang dimaksud secara fisik sebagai kota terdiri dari berbagai bentuk bangunan yang monumental, ruang terbuka dan fasilitas yang mendukung sarana dan prasarana, serta jalan raya. Pengertian tersebut bagi masyarakat pada umumnya dapat dikenali dengan mudah, dimana terdapat bangunan dan fasilitas yang lengkap pasti akan disebut kota (Kusumo, 2015:3-4)

Pola penempatan tinggalan kolonial Belanda khususnya bangunan perkantoran di Kabupaten Maros berbentuk pola menyebar karena pola lokasinya yang tidak merata dan tidak memusat pada satu lokasi.

Pola menyebar (*dispersed pattern*) menurut Alexander. J.W adalah bentuk dari perkotaan yang terjadi pada keadaan topografi yang seragam dan ekonomi yang homogen. Adapun menurut Hudson pola menyebar atau memencar adalah berada dalam kesatuan morfologi yang besar dan kompak terdapat beberapa urban center, dimana masing-masing pusat mempunyai grupfungsi-fungsi khusus dan berbeda satu sama lain.

Pola penempatan bangunan pemerintahan dalam hal ini bangunan perkantoran di Provinsi Gorontalo memiliki kesamaan dengan Kabupaten Maros yaitu berbentuk pola menyebar atau memencar karena polanya tidak merata di satu titik.

Ruang pemerintahan yang mencakup dari penelitian ini mencakup Kantor Kejaksaan, Kantor *Landraad*, Kantor *Controleur*, Kantor Pemerintahan Belanda, Kantor Pos, Kantor Pekerjaan Umum Lama, dan Kantor Karaeng Turikale ketujuh bangunan ini merupakan sarana pemerintahan masa kolonial di Kabupaten Maros. Keletakan dan pendirian bangunan tersebut untuk memudahkan dalam mengkoordinasi atau mengontrol urusan pemerintahan dan masa kolonial. Bangunan-bangunan ini hanya dibatasi oleh jalan dan pagar pembatas lahan bangunan.

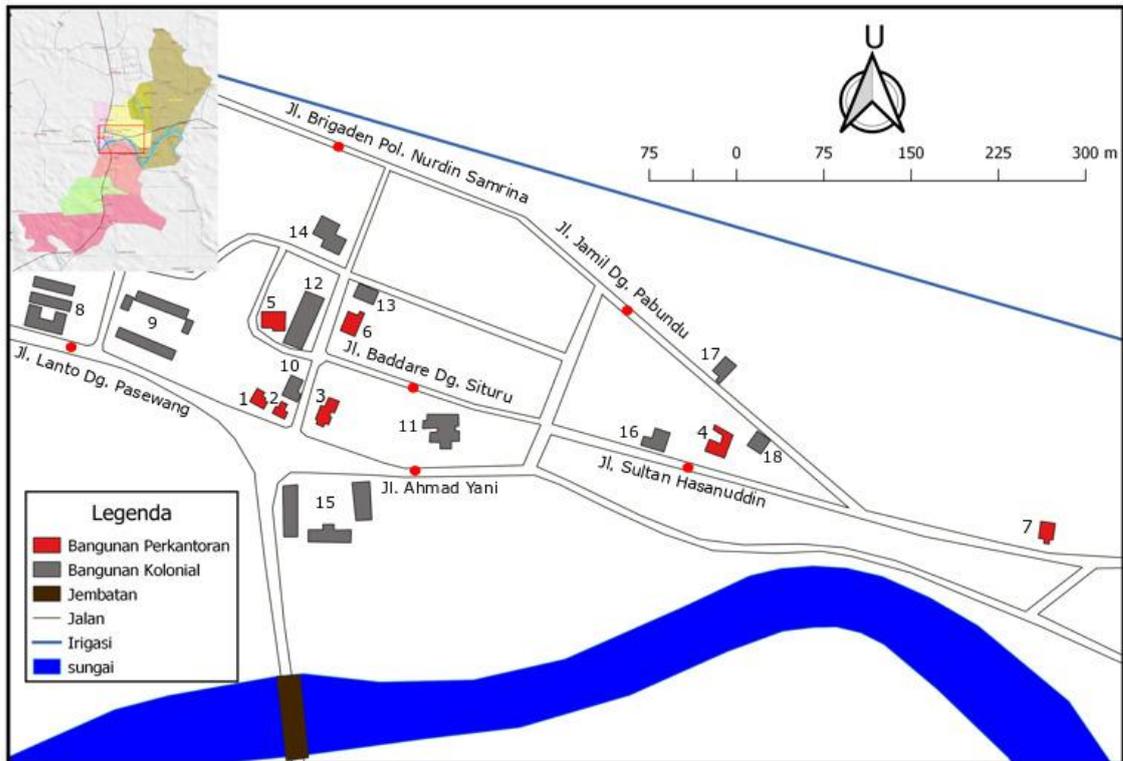
Penempatan tinggalan kolonial pada bangunan perkantoran di Kabupaten Maros dan hubungannya didasarkan pada kepentingan bidang pertahanan dan keamanan yang dapat dilihat dari bangunan *Beheerder Huis van Berawing* Maros atau sekarang sudah dijadikan rumah tinggal pegawai lapas Maros dan *Pesanggrahan Pradjoeritz Kazerne* (Tangsi Polisi) yang sekarang sudah menjadi Polres Maros (lihat peta 4), Kantor *Landraad* berhubungan pula dengan Kantor Pekerjaan Umum Lama atau pada zaman Belanda dijadikan sebagai Gudang Peralatan dari Kantor *Landraad* (lihat peta 4).

Hubungan keletakan bangunan perkantoran dan bangunan rumah tinggal yang berdekatan, dikarenakan agar jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Bahkan terdapat beberapa kantor yang lokasinya berdekatan dengan rumah dinas seperti Kantor *Landraad* dan Kantor Kejaksaan berdekatan dengan Rumah Jabatan Hakim Ketua, eks Kantor *Controleur*/eks Rumah Sakit atau sekarang telah dijadikan sebagai perumahan asrama kodim, *Quenshead*. Kantor *Controleur* Belanda berdekatan dengan Rumah Jabatan Asisten *Resident* atau sekarang telah dijadikan sebagai Rumah Jabatan Bupati Maros (lihat table 3).

Tabel 3. Jarak antar Bangunan

No.	Nama Bangunan	Jarak
1.	Kantor Kejaksaan Maros dan Kantor <i>Landraad</i>	23,22 m
2.	Kantor <i>Landraad</i> dan Rumah Jabatan Hakim Ketua	25,38 m
3.	Rumah Jabatan Hakim Ketua dan Kantor <i>Controleur</i> /Rumah Sakit (Perumahan Kodim)	22,98 m
4.	Kantor <i>Controleur</i> /Rumah Sakit (Perumahan Kodim) dan <i>Quenshead</i>	66,37 m
5.	Kantor <i>Controleur</i> Belanda dan Rumah Jabatan Asisten <i>Resident</i>	99,07 m

Dalam hal ini interpretasi hubungan bangunan perkantoran dan rumah tinggal yang berdekatan didasarkan pada kepentingan di ruang bidang pemerintahan dan pelayanan yang keterkaitannya dengan ruang pemukiman pada kawasan rumah tinggal penguasa, baik itu penguasa dari pemerintahan Belanda itu sendiri maupun penguasa dari pemerintah lokal.



Keterangan:

1. Eks Mess Pegawai Kejaksaan (Kantor Kejaksaan Maros)
2. Rumah Dinas Pegawai Pengadilan (Kantor Landraad)
3. Museum Daerah Maros (kantor Controleur Belanda)
4. Posko Siaga Bencana Kabupaten Maros (Kantor Pemerintah Belanda)
5. Kantor Pos (Kantor Poost)
6. Kantor Pekerjaan Umum Lama (Gedung Peralatan Kantor Landraad)
7. Eks Kantor Kelurahan Turikale (Kantor Karaeng Turikale)
8. Sekolah (SD Negeri 30 Maros)
9. Behearder Huis van Berawing Maros (Penjara Lama Maros)
10. Rumah Jabatan Hakim Ketua
11. Rumah Jabatan Asisten Residen (Rujab Bupati Maros)
12. Kantor Controleur/Rumah Sakit (Perumahan Kodim)
13. Quenshead (Rumah Pegawai Dinas PU Prov. Sulsel)
14. Rumah Tinggal 1
15. Pesangrahan Prodjoerits Kazene (Polres Maros)
16. Rumah Tinggal 2
17. Rumah Controleur Belanda
18. Rumah Tinggal 3

Gambar 4. Peta Keletakan Bangunan Perkantoran (Digambar oleh Muh.Hafdal Hasbi, 2019)



Gambar 5. Peta Titik Situs Bangunan Perkantoran (Digambar oleh Muh.Hafdal Hasbi, 2019)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang berada di Sulawesi Selatan dan memiliki tinggalan-tinggalan Kolonial Belanda diantaranya berupa bangunan. Bangunan-bangunan perkantoran yang didirikan di masa Kolonial Belanda diantaranya Kantor Kejaksaan, Kantor *Landraad*, Kantor *Controleur* Belanda, Kantor Pemerintahan Belanda, Kantor Pos, Kantor Pekerjaan Umum Lama dalam hal ini Gudang Peralatan Kantor *Landraad*, dan Kantor Karaeng Turikale. Pentingnya Kabupaten Maros bagi pemerintahan Belanda adalah sebagai perantara dalam mengontrol dan menguasai Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone.

Pola penempatan bangunan perkantoran di Kabupaten Maros khususnya di Kecamatan Turikale berpola menyebar karena pola lokasinya yang tidak merata dan tidak memusat pada satu lokasi. Bangunan perkantoran kolonial Belanda di Kabupaten Maros berpusat di Kecamatan Turikale. Dalam melakukan penataan pola penempatan bangunan perkantoran, pemerintah Belanda melakukan pembagian ruang atau tempat yang jelas terhadap bangunan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Belanda pada masa lampau telah melakukan penataan ruang perkantoran melalui perencanaan yang baik dan sangat strategis.

Adapun pembagian atau penataan ruang penempatan bangunan perkantoran, berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Bangunan perkantoran yang didasarkan atas kepentingan di ruang bidang pertahanan dan keamanan yang dapat dilihat dari bangunan *Beheerder Huis van*

Berawing Maros, Pesangrahan Pradjoeritz Kazerne (Tangsi Polisi) yang sekarang sudah menjadi Polres Maros, Kantor Kejaksaan Maros, dan Kantor *Landraad* yang dibangun di ujung sebelah Barat Kabupaten Maros.

- b. Bangunan perkantoran yang didasarkan atas kepentingan di ruang bidang pemerintahan dan pelayanan yang keterkaitannya dengan ruang pemukiman pada kawasan rumah tinggal penguasa, baik itu penguasa dari pemerintahan Belanda itu sendiri maupun penguasa dari pemerintah lokal yang dibangun di sisi timur.

Hubungan keletakan bangunan perkantoran dan bangunan rumah tinggal yang berdekatan, dikarenakan agar jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Dan juga hubungan bangunan perkantoran dan rumah tinggal yang berdekatan dikarenakan agar penguasa dari pemerintahan Belanda mampu mengontrol penguasa maupun masyarakat lokal dari Kabupaten Maros itu sendiri.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola penempatan bangunan perkantoran pada pemerintahan masa Kolonial Belanda di Kabupaten Maros memiliki pola yang sangat strategis dan cukup baik. Hal ini bisa dijadikan masukan dalam penataan ruang khususnya bangunan perkantoran di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmunandar. 2008. *"Membangun Identitas Masyarakat Melalui Kota Kuna Makassar"*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Bodro Kusumo, Caesar. 2015. *"Kota Purworejo Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1900-1942"*. Skripsi Sarjana. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Baharuddin. 2013. *"Pola Penempatan Bangunan Kantor Pemerintahan Kolonial Belanda Di Kota Makassar"*. Skripsi Sarjana. Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Daeng Makkelo, Ilham. 2017. *"Sejarah Perkotaan Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis"* dalam Lensa Budaya Vol 12 No 2 Oktober 2017. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Djamal, Syuryani. 2014. *"Perubahan Tata Ruang Kota Kerajaan Tidore"* dalam Agora Jurnal Arsitektur Vol 14 No 2. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ema Kurniawati, Feri. 2010. *"Kota Purworejo Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1900-1942"*. Skripsi Sarjana. Semarang: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fachry Makkasau, Andi. 1990. *"Kerajaan-Kerajaan Di Maros Dalam Lintasan Sejarah 1463-1963"*. Maros: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Haerani, Jarnia. 2010. *"Persebaran Bangunan Kolonial Belanda Di Kota Maros"*. Skripsi Sarjana. Makassar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- Handinoto & Samuel Hartono. -. *"The Amsterdam School dan Perkembangan Arsitektur Kolonial di Hindia Belanda Antara 1915-1940"*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Hasanuddin, dkk. 2012. *"Laporan Penelitian Pelestarian Sumberdaya Arkeologi Pada Bangunan Kolonial Di Kota Makassar Dan Maros"*. Balai Arkeologi Makassar.

- Lenrawati. 2010. *"Pemukiman Masa Kolonial Di Kota Benteng Kabupaten Selayar"*. Skripsi Sarjana. Makassar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- Lenrawati. 2016. *"Pemukiman Masa Kolonial Di Kota Benteng Selayar"* dalam **Walenna** Vol 14 No 2 November 2016. Makassar: Balai Arkeologi Makassar.
- Lynch, Kevin. 1990. *"Good City Form"*. London: Massachusetts Institute of Technology.
- Mattulada. 2011. *"Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah"*. Yogyakarta. Ombak.
- Mundarjito. 2002. *"Pertimbangan Ekologis Penempatan Situs Masa Hindu-Buda Di Daerah Yogyakarta"*. Jakarta. Wedatama Widya Sastra.
- Nabilla Aninditya, Nasya. 2017. *"Pengaruh Fungsi Dan Hierarki Ruang Terhadap Bentuk Arsitektur Bangunan Utama Stasiun Kejaksaan Cirebon"* dalam **Riset Arsitektur** Vol 1 No 2 April 2017. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.
- Natsir, Mohammad dkk. 2013. *"Bangunan Bersejarah di Kota Makassar"*. Makassar: Balai Pelestarian Cagar Budaya.
- Novita, Aryandini. 2017. *"Pemukiman Orang Melayu Di Bangka"* dalam **Siddhayatra** Vol 22 No I Mei 2017. Palembang: Balai Arkeologi Sumatra Selatan.
- Nur, M., & Hasanuddin. 2014. *"Kota Maros Masa Kolonial"*. Maros: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Maros.
- Nur Susanto, Nugroho. 2010. *"Tata Kota Era Kolonial Tarakan, Kalimantan Timur"* dalam **Berita Penelitian Arkeologi** Vol 4 No 1 September 2010. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Nur Susanto, Nugroho. 2011. *"Kehadiran Belanda Dan Tata Kota Balikpapan"* dalam **Nadittira Widya** Vol 5 No 1 Februari 2011. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.

- Purwanto, L.M.F. 2005. "*Kota Kolonial Lama Semarang*" dalam **Dimensi Arsitektur** Vol 33 No 1 Juli 2005. Universitas Kristen Petra.
- Ririmasse, Marlon. 2007. "*Ruang Sebagai Wahana Makna : Aspek Simbolik Pola Tata Ruang dalam Rekayasa Pemukiman Kuna di Maluku*" dalam **Kapata Arkeologi** Vol 3 No 5 November 2007. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
- Siregar, Raja Khairul Ikhsan. 2017. "*Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda Di Kota Langsa*". Skripsi Sarjana. Banda Aceh: Fakultas Adab Dan Humaniora.
- Setiawan Lee Albert, Matthew & Adi Santosa. 2013. "*Gaya Kolonial Pada Rumah Tinggal Keluarga Ko Som Ien dan Ko Kwat Ie Di Magelang*" dalam **Jurnal Intra** Vol 1 No 2. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Sukarno Gayatri Pipiet, Antariksa, & Noviani Suryasari. 2014. "*Karakter Visual Fasade Bangunan Kolonial Belanda Rumah Dinas Bakorwil Kota Madiun*" dalam **Jurnal Arsitektur Nalars** Vol 13 No 2 Juli 2014. Madiun: Universitas Brawijaya.
- Veronica, Selly & Rahma Wardani Siregar.-. "*Pengaruh Masa Kolonial Terhadap Struktur Ruang Kawasan*" dalam **Seminar Nasional Kearifan Lokal dalam Keberagaman untuk Pembangunan Indonesia**. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wahid Marzuki, Irfanuddin. 2015. "*Pola Keletakan Bangunan Indis Di Kota Gorontalo*" dalam **Berkala Arkeologi** Vol 35 No 1 Mei 2015. Manado: Balai Arkeologi Manado.
- Wahid Marzuki, Irfanuddin. 2018. "*Perkembangan Morfologi Kota Gorontalo Dari Masa Tradisional Hingga Kolonial*". <http://repositori.kemdikbud.go.id/9904/1/Gorontalo.pdf>. (Diakses pada tanggal Jumat, 17 Januari 2020).
- Zid, Muhammad & Sofjan Sjaf. 2009. "*Sejarah Perkembangan Desa Bugis Makassar*" dalam **Jurnal Sejarah** Vol 6 No 2 Juli 2009. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Muh. Makmur
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Langsung I No. 1 Kelurahan Turikale

2. Nama : Burhan Jaya, S.Sos
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Disbudpar Kab.Maros)
Alamat : Btn Haji Banca

3. Nama : Muh. Tahar
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pengadilan Negeri Kab.Maros)
Alamat : Jalan Lanto Dg. Pasewang

4. Nama : Andi Fahry Makkasau
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Maros

5. Nama : Hariaty, S.E
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Btn Papan Lestari A3 no 9

6. Nama : Abd. Fattah, S.E
Alamat : 63 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Btn Panrita Bola blok C/ no 23 Maros